

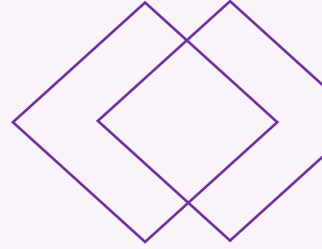
Katalog: 1202062

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM TA 2025



BADAN PUSAT STATISTIK





Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik Tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini tidak semata-mata disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata atas pelaksanaan tugas dan amanah yang kami emban. Dokumen ini merefleksikan komitmen kami dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik secara menyeluruh.

Sebagai penutup tahun anggaran, laporan ini menyajikan gambaran yang transparan mengenai pengelolaan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, sepanjang tahun 2025. Seluruh capaian, upaya, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Humas dan Hukum BPS kami uraikan dan pertanggungjawabkan, baik kepada Kepala BPS maupun kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penyusunannya, laporan ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta memperhatikan arahan internal melalui Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-1/02000/PR.630/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pelaporan SAKIP 2025 dan Perencanaan SAKIP 2026 Unit Kerja Pusat.

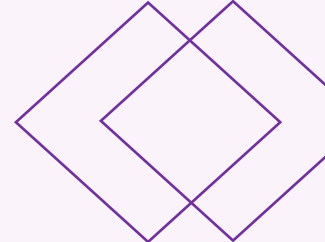
Kami berharap paparan mengenai perencanaan dan realisasi kinerja tahun 2025 yang tersaji dalam laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penguatan kinerja BPS ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dalam penyusunan laporan ini. Kami juga senantiasa terbuka terhadap masukan dan saran yang konstruktif sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,

M. Nashrul Wajdi

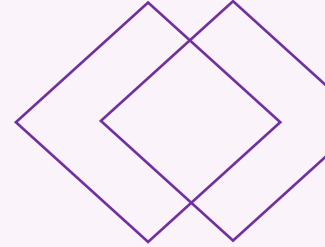




Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. LATAR BELAKANG	9
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI	10
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN DUKUNGAN ANGGARAN	12
1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN	16
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. VISI DAN MISI BPS	21
2.2. TARGET KINERJA 2025-2029	29
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	31
2.4. DUKUNGAN BPS TERHADAP PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PRESIDEN, DAN ISU STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025	32
2.5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025	34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. REALISASI, CAPAIAN KINERJA, DAN NILAI PENILAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025	38
3.2. CAPAIAN KINERJA BPS TERHADAP TARGET RENSTRA	46
3.3. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PRESIDEN, DAN ISU STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025	48
3.4. PRESTASI DAN INOVASI	49
3.5. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN	54
BAB IV. PENUTUP	56
4.1. KESIMPULAN	57
4.2. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA	57
LAMPIRAN	59

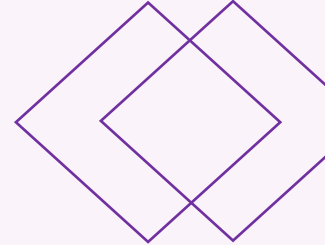




Daftar Tabel

Tabel 1. Alokasi Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 (dalam juta rupiah)	16
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2025-2029	30
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2025	31
Tabel 4. Dukungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	32
Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 (dalam juta rupiah)	34
Tabel 6. Rata-rata Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2025	38
Tabel 7. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025	42
Tabel 8. Kendala dan Solusi per Indikator Kinerja Tahun 2025	45
Tabel 9. Rencana Tindak Lanjut per Indikator Kinerja tahun 2025	45
Tabel 10. Capaian Kinerja per Indikator Kinerja terhadap Target Renstra 2025 dan 2029	46
Tabel 12. Prestasi dan Inovasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025	50
Tabel 13. Capaian Kineja, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Tahun 2025	55

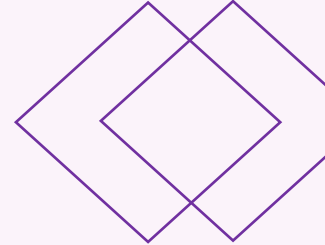




Daftar Gambar

Gambar 1. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan _____	9
Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum _____	11
Gambar 3. Landasan Hukum Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum _____	12
Gambar 4. Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut pendidikan, Desember 2025 _____	13
Gambar 5. Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut jenis kelamin, Desember 2025 _____	14
Gambar 6. Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut kelompok umur, Desember 2025 _____	15
Gambar 7. Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum _____	17
Gambar 8. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Badan Pusat Statistik 2025-2029 _____	27
Gambar 9. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran _____	28
Badan Pusat Statistik _____	28
Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2023-2025 _____	39
Gambar 11. Nilai PKO Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 _____	40





Daftar Lampiran

Lampiran I Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025	60
Lampiran II Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	62
Lampiran III Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	63
Lampiran IV Jumlah Pejabat Fungsional Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025	64
Lampiran V Daftar Prestasi/Penghargaan dan Inovasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025	65
Lampiran VI Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025	66



Ringkasan Eksekutif

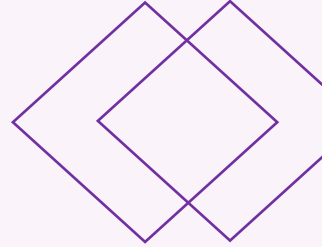
Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sarana evaluasi atas capaian kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola kelembagaan BPS. Tugas yang dilaksanakan meliputi penyelenggaraan kerja sama, keprotokolan dan persidangan, penyiapan materi pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat, fasilitasi dan advokasi hukum, serta penataan organisasi. Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk memastikan dukungan manajerial, komunikasi publik, dan kepastian hukum berjalan selaras dengan kebijakan dan prioritas BPS.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan secara terencana dan terukur. Capaian kinerja pada indikator utama menunjukkan hasil yang sangat baik, disertai dengan penguatan manajemen kinerja yang lebih komprehensif. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan setiap target dapat dicapai secara optimal.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berkomitmen menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penajaman prioritas kegiatan, pengendalian belanja, serta optimalisasi sumber daya menjadi langkah yang ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara realisasi anggaran dan pencapaian sasaran strategis.

Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah dievaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut Tahun 2026. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga instrumen pembelajaran untuk mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.



Bab I. Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

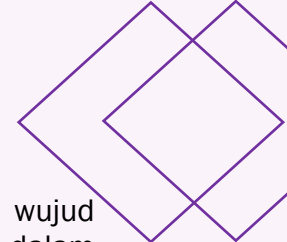
Di tengah arus disrupsi informasi dan percepatan transformasi digital, tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good governance* telah menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan birokrasi modern. Tuntutan publik semakin tinggi terhadap pemerintah agar mampu bersikap adaptif terhadap dinamika eksternal sekaligus tangkas dalam merespons persoalan yang kian kompleks. Masyarakat tidak hanya menghendaki kecepatan layanan, tetapi juga keterbukaan, keadilan, serta kejelasan pertanggungjawaban. Dalam konteks tersebut, penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi menjadi landasan penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam kerangka sistem statistik nasional, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki posisi strategis sebagai representasi institusi sekaligus penghubung antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan publik. Peran ini menuntut kapasitas komunikasi yang andal, dukungan hukum yang kuat, serta tata kelola organisasi yang solid. Untuk itu, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran.

Mengacu pada kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan ini tidak diposisikan sekadar sebagai dokumen administratif. Lebih dari itu, Laporan Kinerja menjadi instrumen evaluatif yang digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis secara terukur dan objektif. Disusun secara sistematis serta disampaikan secara berkala paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, dokumen ini merepresentasikan komitmen profesional dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat sekaligus menjadi dasar perbaikan dan penguatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.



Gambar 1. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran untuk mencapai tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun Anggaran 2025 menjadi representasi komitmen unit kerja ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berupaya menghadirkan informasi kinerja yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap Badan Pusat Statistik.

Laporan Tahun Anggaran 2025 memuat gambaran menyeluruh mengenai realisasi kinerja selama satu periode anggaran, yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif serta bahan perbaikan yang konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

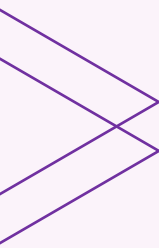
Secara substansial, penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun tujuannya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan kinerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai pijakan dalam merumuskan rekomendasi dan menyempurnakan perencanaan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki tugas sebagai berikut:

Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



a. Pelaksanaan kerja sama, keprotokolanan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan

c. Pelaksanaan hukum dan organisasi.

Pada pasal 21 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

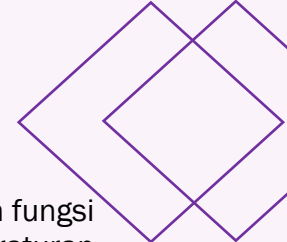
Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan jadwal protokoler pimpinan, mengakomodasi penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, *sound system*, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Landasan hukum menjadi fondasi utama dalam setiap perumusan kebijakan dan pelaksanaan tindakan oleh instansi pemerintah, termasuk Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, keberadaan dasar hukum yang jelas berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, menjunjung asas keadilan, serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi.

Beragam regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri, menjadi pedoman normatif dalam mengatur mekanisme tata kelola, sistem akuntabilitas, serta tanggung jawab institusi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kepastian dan konsistensi terhadap kerangka regulasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.



Dengan landasan hukum yang tegas dan terstruktur, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum diharapkan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini sekaligus menjadi instrumen untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkualitas.

Sehubungan dengan itu, berikut disampaikan landasan hukum yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.



Gambar 3. Landasan Hukum Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

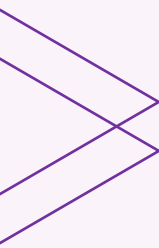
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

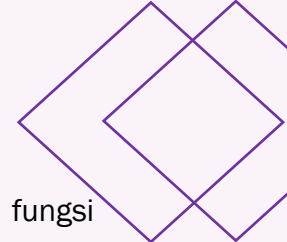
Sumber daya manusia merupakan unsur strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum. Berdasarkan data kepegawaian yang tersedia, komposisi pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menunjukkan struktur yang relatif proporsional, baik dari sisi golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, maupun rentang usia. Kondisi ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam menjalankan mandat kelembagaan secara profesional dan berkelanjutan.

Komposisi Berdasarkan Golongan

Ditinjau dari golongan ruang, mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yang mencakup jenjang III/a hingga III/d. Dominasi golongan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada level pelaksana dan penata, yang secara fungsional menjadi tulang punggung operasional biro. Pada jenjang III/a terlihat adanya peningkatan jumlah pegawai dengan TMT terbaru, yang mengindikasikan adanya proses regenerasi melalui pengangkatan pegawai baru atau kenaikan pangkat reguler.

Golongan III/b dan III/c umumnya diisi oleh pegawai dengan pengalaman kerja yang lebih matang serta latar belakang pendidikan sarjana atau diploma IV. Sementara itu, Golongan III/d didominasi oleh pegawai dengan masa kerja lebih panjang dan sebagian



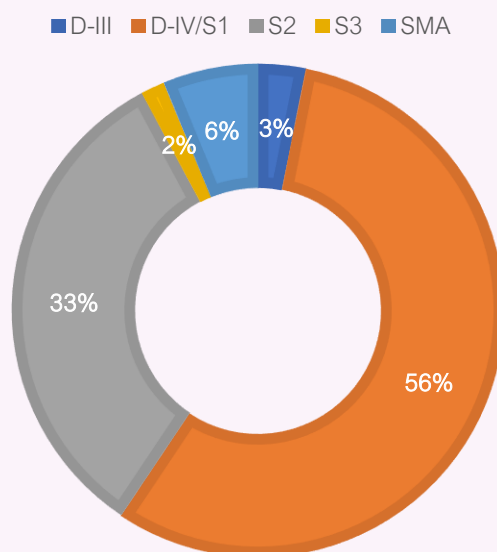


telah menempuh pendidikan pascasarjana, yang berperan dalam mendukung fungsi koordinatif dan substansi teknis yang lebih kompleks.

Pada Golongan IV, khususnya IV/a dan IV/b, terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan mayoritas S-2 dan masa kerja yang relatif panjang. Kelompok ini merepresentasikan lapisan manajerial dan senior yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis, pembinaan teknis, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Komposisi ini menunjukkan adanya kesinambungan jalur karier dari jenjang pelaksana menuju jenjang struktural dan senior.

Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PERSENTASE PEGAWAI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM MENURUT PENDIDIKAN, DESEMBER 2025

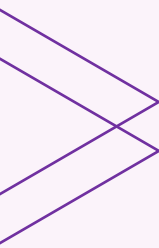


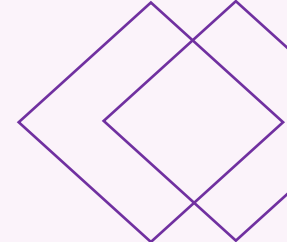
Gambar 4. Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut pendidikan, Desember 2025

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan minimal Sarjana (S-1). Bidang keilmuan yang mendominasi antara lain Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Statistik, Manajemen, serta beberapa disiplin ilmu sosial dan bahasa. Variasi latar belakang pendidikan ini sejalan dengan karakter tugas Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mencakup fungsi kehumasan, kerja sama, protokoler, persidangan, serta pengelolaan aspek hukum dan organisasi.

Keberadaan pegawai dengan pendidikan Diploma IV, khususnya di bidang statistik, turut memperkuat kompetensi teknis dalam mendukung penyajian data dan informasi publik yang akurat dan kredibel. Selain itu, jumlah pegawai dengan pendidikan S-2 menunjukkan tren peningkatan kapasitas akademik yang signifikan, terutama pada jenjang golongan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas analisis kebijakan, penyusunan regulasi, serta pengelolaan komunikasi strategis.

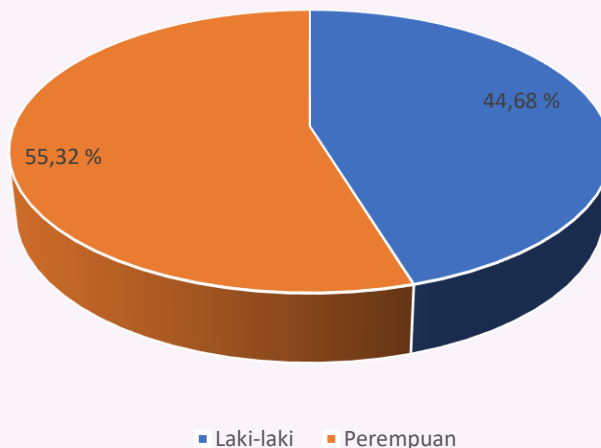
Secara umum, struktur pendidikan pegawai telah mencerminkan kesesuaian antara kompetensi akademik dan kebutuhan organisasi, meskipun pengembangan kapasitas lanjutan tetap diperlukan untuk menjawab dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.





Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin

Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut jenis kelamin, Desember 2025



Gambar 5. Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut jenis kelamin, Desember 2025

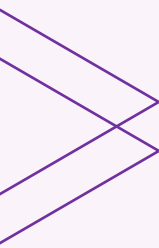
Dari aspek gender, komposisi pegawai menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara laki-laki dan perempuan. Pada beberapa golongan, terutama III/a dan III/b, jumlah pegawai perempuan relatif dominan, sementara pada bidang teknis tertentu terdapat kecenderungan jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak. Secara keseluruhan, tidak terdapat kesenjangan signifikan dalam distribusi gender.

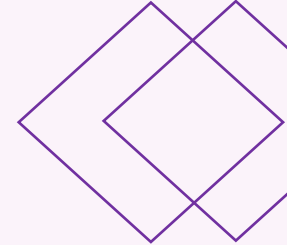
Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya manusia, di mana kesempatan pengembangan karier dan penempatan jabatan diberikan secara proporsional berdasarkan kompetensi dan kinerja, tanpa membedakan jenis kelamin.

Komposisi Berdasarkan Usia dan Regenerasi

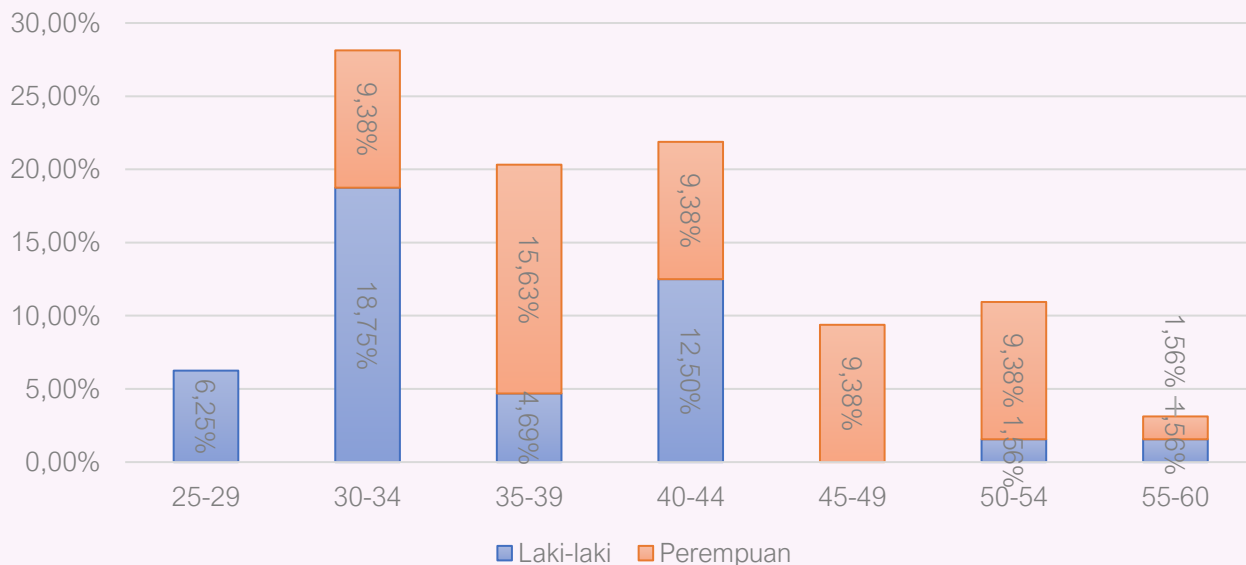
Rentang usia pegawai menunjukkan variasi yang cukup sehat, dengan tahun kelahiran yang berkisar antara generasi senior hingga generasi muda. Mayoritas pegawai berada pada kelompok usia produktif, khususnya kelahiran antara tahun 1985 hingga awal 2000-an. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki basis tenaga kerja yang dinamis dan potensial untuk pengembangan jangka panjang.

Keberadaan pegawai senior dengan pengalaman panjang menjadi sumber pengetahuan institusional dan stabilitas organisasi. Di sisi lain, masuknya pegawai muda dengan latar belakang pendidikan yang relevan menjadi indikator terjadinya regenerasi yang positif. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan inovasi dalam pelaksanaan tugas.





PERSENTASE PEGAWAI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM MENURUT KELOMPOK UMUR, DESEMBER 2025



Gambar 6. Persentase Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menurut kelompok umur, Desember 2025

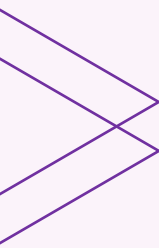
Kesimpulan Umum

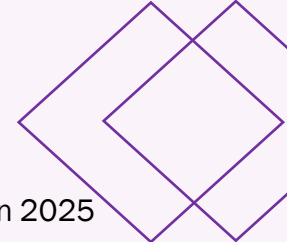
Secara keseluruhan, profil sumber daya manusia Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menunjukkan kesiapan struktural dan kompetensial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan adaptabilitas terhadap dinamika eksternal—termasuk perkembangan regulasi, transformasi digital, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi—diperlukan perencanaan pengembangan SDM yang terarah. Hal tersebut meliputi penguatan kompetensi substantif dan manajerial, perencanaan suksesi jabatan, optimalisasi pemetaan talenta, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan organisasi.

Dengan pengelolaan SDM yang strategis dan berkelanjutan, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat fungsi komunikasi publik dan dukungan hukum, serta berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja Sekretariat Utama dan Badan Pusat Statistik secara keseluruhan..

Dukungan Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Pada awal tahun anggaran 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menerima dukungan anggaran sebesar 33,848 miliar rupiah. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan yang terbagi dalam sembilan rincian output. Rincian pagu anggaran untuk masing-masing output dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 1. Alokasi Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 (dalam juta rupiah)

Klasifikasi Rincian Output(KRO)/ Rincian Output (RO)	Pagu Awal		Pagu Akhir		Keterangan
	Pagu Awal	% terhadap Pagu Total	Pagu Akhir	% terhadap Pagu Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	373,55	0,54	
Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi	2.571,60	7,60	37.522,40	54,07	Publisitas
Layanan Hukum	10.071,92	29,76	348,12	0,5	
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.975,29	11,74	1.486,01	2,14	
Layanan Protokoler	1.164,57	3,44	208,74	0,30	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.297,75	9,74	13.035,40	18,79	
Layanan Bantuan Hukum	601,12	1,78	328,70	0,47	
Layanan Perkantoran	6.800,60	20,09	15.635,44	22,53	
Layanan Sosialisasi	5.365,37	15,85	451,70	0,65	
Total Pagu Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	33.848,24	100,00	69.390,05	100,00	

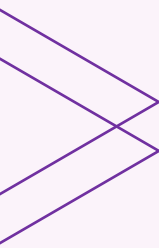
Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan beberapa kali revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu akhir untuk Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum ditetapkan sebesar Rp 33,84824 miliar rupiah, yang mengalami penambahan sebesar Rp 35,54181 miliar rupiah dibandingkan dengan pagu awal. Penambahan terbesar terdapat pada rincian output Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi yang merupakan salah satu kegiatan prioritas BPS.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Potensi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki potensi kelembagaan yang cukup kuat dari sisi kualitas dan komposisi sumber daya manusia. Mayoritas pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S-1), dengan proporsi signifikan pada jenjang pascasarjana (S-2), khususnya di bidang hukum, komunikasi, manajemen, ekonomi, dan statistik. Keberagaman latar belakang keilmuan tersebut memberikan keunggulan multidisipliner yang relevan dengan karakter tugas biro yang mencakup fungsi kehumasan, pengelolaan informasi publik, advokasi dan pendampingan hukum, serta dukungan penyusunan regulasi dan kebijakan internal.

Dominasi pegawai pada Golongan III menunjukkan tersedianya kekuatan teknis operasional yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif. Sementara itu, keberadaan pejabat pada Golongan IV dengan pengalaman dan kualifikasi akademik yang lebih tinggi memperkuat kapasitas manajerial dan pengambilan



keputusan strategis. Kombinasi ini menciptakan struktur organisasi yang relatif seimbang antara fungsi eksekusi dan fungsi pengendalian.



Gambar 7. Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

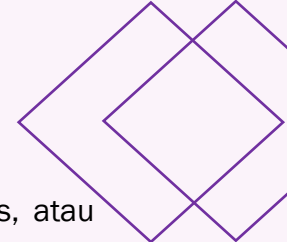
Dari sisi demografi, komposisi usia yang mencakup pegawai senior dan generasi yang lebih muda menjadi potensi tersendiri. Pegawai senior membawa pengalaman institusional, pemahaman historis kebijakan, dan jejaring kerja yang luas, sedangkan pegawai muda menghadirkan energi, adaptabilitas terhadap teknologi, serta perspektif baru dalam pengelolaan komunikasi publik dan layanan berbasis digital. Kondisi ini mendukung proses regenerasi dan keberlanjutan organisasi.

Selain itu, keseimbangan gender yang relatif proporsional mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan dalam manajemen SDM. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan profesional, yang pada akhirnya memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Permasalahan dan Tantangan

Di samping potensi yang dimiliki, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara strategis. Pertama, konsentrasi pegawai pada Golongan III menunjukkan bahwa jalur pengembangan karier menuju jenjang manajerial perlu direncanakan secara sistematis agar tidak terjadi stagnasi promosi jabatan. Tanpa perencanaan suksesi yang jelas, risiko kesenjangan kepemimpinan dapat muncul ketika pegawai senior memasuki masa pensiun.

Kedua, meskipun latar belakang pendidikan cukup beragam, belum tentu seluruh kompetensi tersebut telah terpetakan secara optimal sesuai kebutuhan jabatan dan beban kerja. Potensi mismatch antara kompetensi individu dengan tuntutan jabatan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam fungsi yang



membutuhkan keahlian spesifik seperti litigasi, legal drafting, komunikasi krisis, atau pengelolaan media digital.

Ketiga, dinamika eksternal yang semakin kompleks—termasuk peningkatan tuntutan transparansi publik, percepatan transformasi digital, serta perkembangan regulasi yang cepat—menuntut peningkatan kapasitas adaptif organisasi. Tanpa penguatan kompetensi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan (training need analysis), biro dapat menghadapi kesenjangan kompetensi dalam jangka menengah dan panjang.

Keempat, distribusi usia yang beragam meskipun menjadi potensi, juga memerlukan strategi manajemen pengetahuan (knowledge management) yang sistematis. Apabila tidak dikelola dengan baik, terdapat risiko hilangnya pengetahuan institusional ketika pegawai senior memasuki masa purnatugas.

Penegasan Strategis

Secara umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki fondasi SDM yang kuat untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Namun, optimalisasi potensi tersebut memerlukan pengelolaan yang terarah melalui perencanaan suksesi jabatan, pemetaan talenta, penguatan kompetensi substantif dan digital, serta pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Dengan pendekatan manajerial yang strategis dan berkelanjutan, biro akan mampu meningkatkan daya adaptif, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memperkuat fungsi komunikasi dan dukungan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

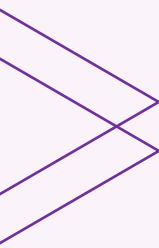
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

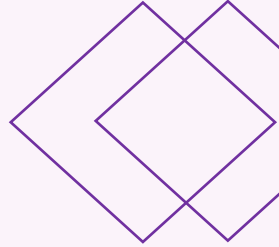
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, landasan hukum, sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; target kinerja; perjanjian kinerja; Dukungan terhadap prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional; juga rencana kerja dan anggaran tahun 2025 yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum





Bab III Akuntabilitas Kinerja

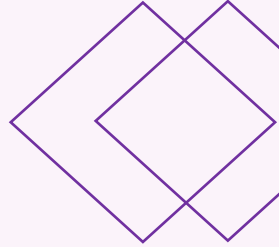
Pada bab ini disajikan realisasi, capaian kinerja dan nilai penilaian kinerja organisasi 2025; capaian kinerja terhadap target renstra; Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; prestasi dan inovasi; juga realisasi dan efisiensi anggaran 2025.

Bab IV Penutup

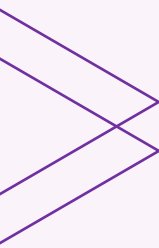
Pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja.

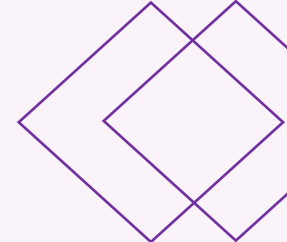
Lampiran





Bab II. Perencanaan Kinerja



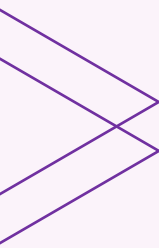


2.1. Visi dan Misi BPS

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini juga selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas.

Isu-isu strategis kelembagaan tersebut disampaikan dalam uraian di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Pasal 5 Ayat 1, memberikan mandat kepada BPS untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran Indikator 5 (ima) Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP). Berdasarkan hasil identifikasi, dari keseluruhan indikator tersebut, terdapat sekitar 33 persen indikator yang dihasilkan oleh BPS dan sisanya dihasilkan oleh K/L lain, termasuk lembaga asing. Hal ini mengimplikasikan bahwa BPS harus menjaga kualitas 33 persen indikator yang dihasilkan selama periode 2025-2045, sekaligus memperkuat koordinasi dengan K/L lain agar indikator yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang setara dengan indikator yang dihasilkan BPS. Dalam konteks ini, BPS harus berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data melalui penyediaan berbagai indikator pembangunan;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
BPS berperan dalam mendukung Transformasi Digital Nasional melalui penyediaan data digital yang andal serta digitalisasi proses bisnis statistik;
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development);
Keputusan tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi Koordinator Bidang Statistik dan Data. Dengan demikian, BPS tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan praktik terbaik Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada statistik yang dihasilkannya, tetapi juga menjamin bahwa statistik yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi (K/L/D/I) telah mengacu pada standar yang sama sehingga dapat dijadikan rujukan data statistik di tingkat nasional dan internasional;
4. Adanya gejolak ekonomi global, peningkatan ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, arus data yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, disrupsi Revolusi Industri 4.0, dinamika ekonomi domestik, dan perubahan fokus program-program pembangunan pemerintah;
Hal tersebut mewajibkan BPS untuk senantiasa menyediakan statistik resmi yang berkualitas dan mampu memberikan wawasan bagi pengguna, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pemerintah;
5. Independensi BPS dalam menjaga objektivitas dan netralitas indikator statistik; dan



BPS berperan penting dalam menyediakan indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, potensi politisasi terhadap indikator ini dapat menimbulkan bias, serta mengganggu stabilitas nasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, BPS harus menjaga independensi dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas dalam setiap kegiatan statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Dengan adanya isu-isu strategis kelembagaan tersebut, BPS harus menjadi lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Hal tersebut dituangkan dalam pernyataan Visi BPS 2025-2029 sebagaimana berikut:

a. Visi

*Lembaga yang **Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif** dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.*

b. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan.

Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;

2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan

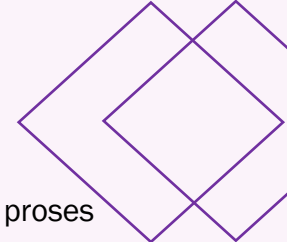
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien;

c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan.

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap



BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)

Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

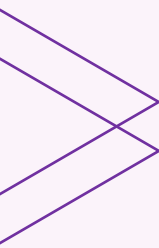
d. Sasaran Strategis

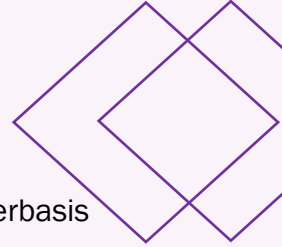
Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan insight atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan





kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (evidence-based policy).

Peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik menandakan keberhasilan BPS dalam tiga aspek utama:

1. efektivitas strategi diseminasi data;
2. peningkatan kualitas dan relevansi informasi yang disediakan; dan
3. kemampuan BPS dalam mendorong budaya penggunaan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan.

Secara konkret, data statistik yang berkualitas dan mudah diakses berperan penting dalam:

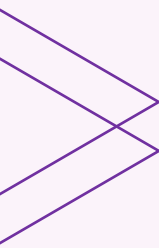
1. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan publik melalui perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual.
2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya pembangunan dengan dasar perencanaan yang lebih akurat dan terukur.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

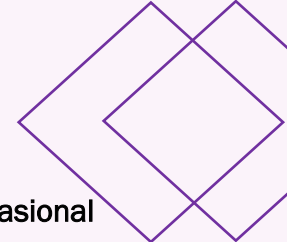
Keberhasilan sasaran ini juga selaras dengan Visi BPS sebagai lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan berbasis data. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tata kelola lembaga yang efektif, SDM yang kompeten, serta infrastruktur yang memadai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran ini.

Risiko utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemanfaatan data statistik oleh pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya data statistik dalam proses pengambilan kebijakan. Risiko lainnya adalah keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan. Hal ini kerap disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber data alternatif seperti big data, data administratif, dan sumber data lainnya. Selain kedua penyebab tersebut, risiko keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan juga disebabkan oleh kapasitas fiskal yang tidak sesuai rencana, yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang akan mengurangi tenaga lapangan, SDM pengolahan, dan infrastruktur pendukung.

Risiko di atas dapat menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada penurunan kualitas kebijakan yang diambil. Penurunan ini disebabkan karena stakeholder terpaksa mengambil keputusan tanpa dukungan data yang akurat dan terkini. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan berpotensi dibentuk tanpa berlandaskan pada data atau bertentangan dengan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting. BPS perlu terus memperkuat strategi literasi data kepada para pengguna, memperluas kolaborasi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta melakukan inovasi dalam metode diseminasi seperti penyediaan dashboard interaktif dan platform data insight yang mudah diakses. Selain itu, BPS juga perlu melakukan penjadwalan ulang dengan skala prioritas, rilis data secara bertahap (modular release) maupun memanfaatkan big data atau data administratif sebagai pelengkap. Melalui pendekatan tersebut, BPS dapat meningkatkan utilisasi data statistik dalam proses kebijakan secara berkelanjutan dan inklusif.





Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain:

1. Menjamin keselarasan antar-data sektoral, sehingga menghindari duplikasi informasi dan memastikan koherensi indikator;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan data, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Mendorong efisiensi dalam operasional statistik, melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

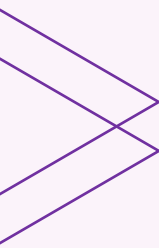
Namun, pencapaian sasaran ini menghadapi beberapa risiko krusial. Risiko pertama adalah duplikasi data atau rendahnya kualitas basis data dalam perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Dampak dari risiko ini adalah pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang tidak tepat.

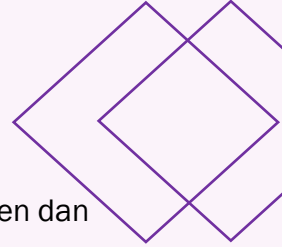
Risiko kedua adalah inkompatibilitas data. Penyebabnya adalah tidak adanya standar Tunggal dalam proses statistik antar sektor. Dampak dari risiko inkompatibilitas data adalah menurunkan kepercayaan terhadap sistem statistik nasional.

Dengan mengelola risiko secara terencana, BPS memastikan Indeks Pembangunan Statistik meningkat secara konsisten, mendukung penyelenggaraan SSN yang berkualitas dan terpadu.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik. Kinerja kelembagaan yang bersih dan profesional akan memperkuat:





1. Kepercayaan publik terhadap BPS sebagai lembaga statistik yang independen dan tepercaya;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam menghasilkan statistik yang berkualitas dan tepat waktu; dan
3. Transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat peran BPS dalam mendukung kebijakan publik berbasis data.

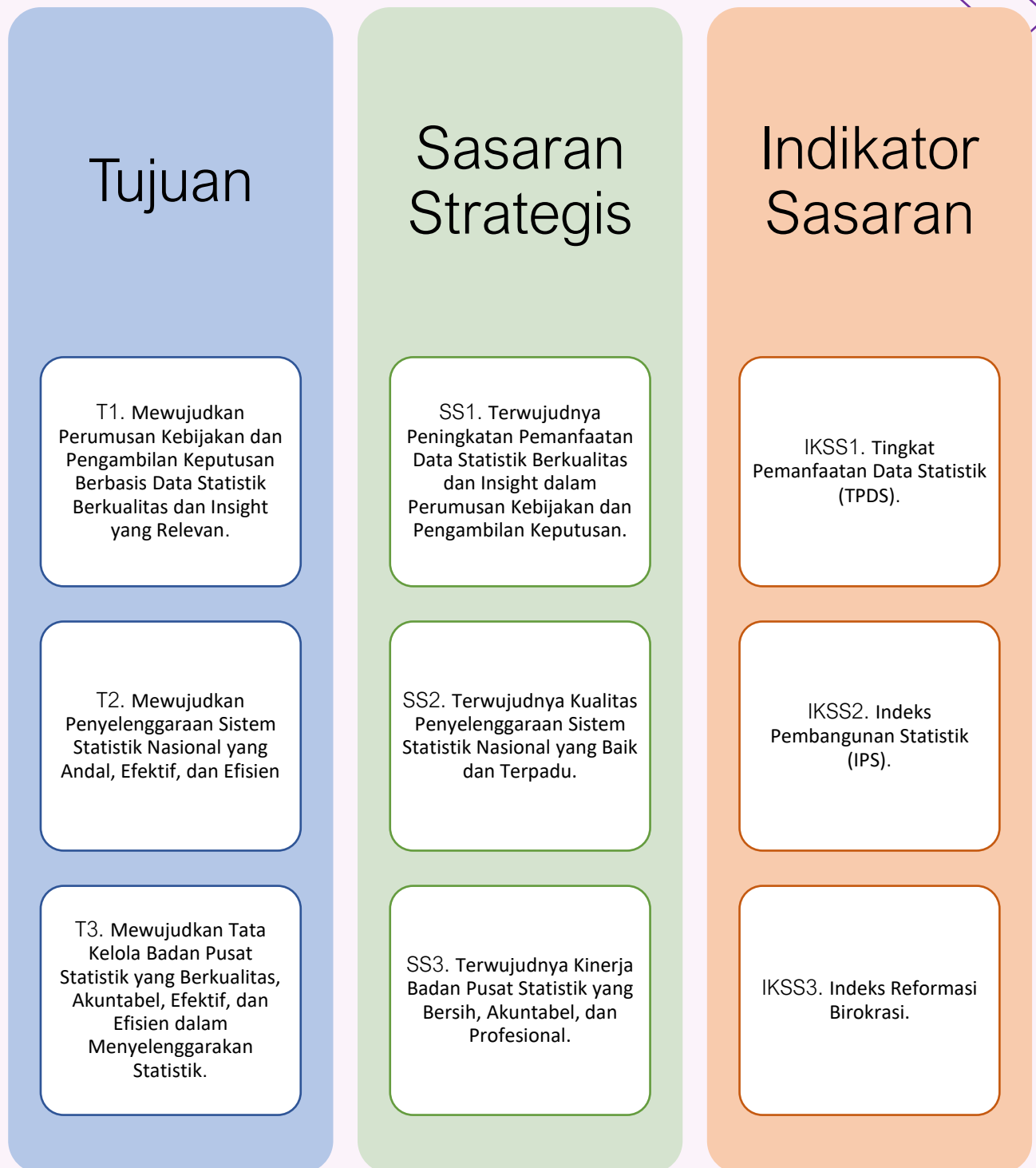
Dalam mewujudkan sasaran ini, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang harus diwaspadai. Risiko utama adalah tidak optimalnya kinerja pegawai, yang ditandai dengan lemahnya budaya kerja positif, rendahnya adaptabilitas terhadap transformasi digital, serta minimnya motivasi dan penghargaan dalam lingkungan kerja. Keterbatasan sistem manajemen SDM, baik dari sisi teknologi maupun sistem pengembangan karir, turut menjadi penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas layanan publik. Dampaknya adalah turunnya produktivitas kerja dan rendahnya kualitas layanan statistik yang diberikan kepada publik dan pemangku kebijakan.

Risiko lainnya adalah penyimpangan atau ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap tata kelola yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh struktur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan strategis dari publik dan pemangku kebijakan, minimnya digitalisasi dalam proses manajemen kelembagaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal. Ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dampak dari kondisi ini dapat memicu penurunan efisiensi organisasi, baik dalam pelaksanaan tugas internal BPS maupun dalam penyediaan statistik berkualitas. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kinerja dapat memunculkan potensi penyimpangan administratif maupun keuangan. Sehingga merusak kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan dan melemahkan kapasitas kelembagaan statistik BPS.

Selain itu, risiko juga muncul dalam bentuk rendahnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor. Minimnya ruang dialog yang partisipatif serta terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penghambat dalam memperluas ekosistem statistik nasional yang kolaboratif. Sehingga menyebabkan pelemahan kapasitas kelembagaan statistik. Risiko ini dapat menyebabkan isolasi peran BPS dalam ekosistem data nasional. Selain itu, kondisi ini juga menghambat upaya membangun kepercayaan publik yang lebih luas terhadap BPS sebagai penyedia data tepercaya. Apabila kolaborasi dan komunikasi lintas sektor tidak berjalan dengan baik, maka pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti menjadi kurang optimal.

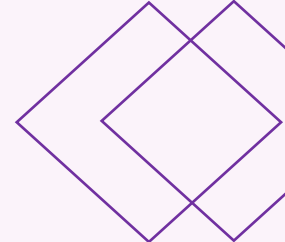
Melalui manajemen risiko yang efektif, BPS dapat menjaga dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga mendukung terwujudnya kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional. Upaya ini mencakup penguatan pengawasan internal, pengembangan SDM, inovasi layanan publik, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten.





Gambar 8. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Badan Pusat Statistik 2025-2029

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran Badan Pusat Statistik diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 9. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran Badan Pusat Statistik

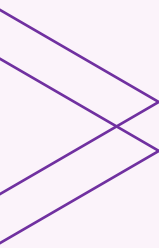
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang esensial bagi suatu organisasi, berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang. Renstra mencakup analisis situasi yang mendalam, penetapan visi dan misi, serta identifikasi tujuan strategis yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Dengan Rencana Strategis, organisasi dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang diperlukan, termasuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

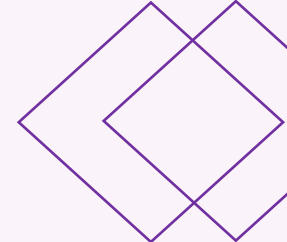
e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja (Lakin) Tahun berjalan, visi, misi, dan tujuan pada level unit kerja Biro Humas dan Hukum belum dapat ditetapkan secara formal. Kondisi ini disebabkan oleh masih berlangsungnya proses penataan organisasi dan penyesuaian struktur tugas dan fungsi pasca perubahan SOTK, sehingga arah strategis unit kerja masih mengacu pada visi dan misi organisasi induk.

Dalam periode pelaporan ini, Biro Humas dan Hukum tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan mandat kelembagaan, dokumen perencanaan strategis instansi, serta perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada level kementerian/lembaga. Dengan demikian, operasional dan capaian kinerja unit tetap berjalan dalam koridor perencanaan strategis yang berlaku, meskipun perumusan visi, misi, dan tujuan spesifik pada level biro masih dalam tahap konsolidasi dan harmonisasi.

Penetapan visi, misi, dan tujuan unit kerja direncanakan akan dilakukan setelah proses penataan organisasi final dan arah kebijakan kelembagaan telah sepenuhnya terdefinisi, sehingga rumusan yang dihasilkan selaras, terukur, dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara keseluruhan.





2.2. Target Kinerja 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor kebijakan Sekretariat Utama serta mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pusat Statistik.

Renstra tidak hanya memuat arah kebijakan dan prioritas kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam penetapan target kinerja yang terukur dari tahun ke tahun. Melalui Renstra, setiap kegiatan yang direncanakan dapat ditelusuri kontribusinya terhadap sasaran organisasi, sehingga proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berjalan lebih sistematis dan terarah.

Pada periode 2025–2029, fokus sasaran kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, peningkatan hubungan kelembagaan baik di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan kualitas produk hukum dan kebijakan beserta implementasinya. Ketiga fokus tersebut menjadi landasan dalam merumuskan indikator kinerja dan target capaian yang realistis namun tetap menantang.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dapat semakin terukur, konsisten, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Sekretariat Utama dan Badan Pusat Statistik secara keseluruhan.

Adapun sasaran kegiatan yang diampu beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan implementasi sistem kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis proses bisnis yang selaras dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Capaian indikator mencerminkan tingkat kematangan penerapan mekanisme kerja baru, efektivitas koordinasi lintas fungsi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

2. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional

Indikator Kinerja: Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

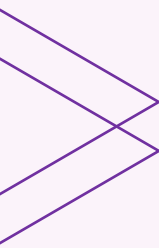
Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan komunikasi publik dan reputasi kelembagaan melalui pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel. Predikat keterbukaan informasi publik menjadi ukuran objektif atas kualitas pelayanan informasi dan pengelolaan komunikasi kelembagaan.

3. Sasaran Kegiatan : Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya

Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Hukum

Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Kebijakan

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan kualitas perumusan, harmonisasi, dan implementasi regulasi di lingkungan organisasi. Indeks Reformasi Hukum mencerminkan



tingkat kemajuan pembaruan sistem hukum dan tata kelola regulasi, sedangkan Indeks Kualitas Kebijakan mengukur mutu substansi, proses penyusunan, serta efektivitas implementasi kebijakan yang dihasilkan.

Keseluruhan sasaran dan indikator tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam target tahunan selama periode 2025–2029 dalam bentuk tabel kinerja. Struktur ini memastikan keterukuran capaian, konsistensi dengan peta strategi Sekretariat Utama, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik secara berkelanjutan.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Rencana Strategis				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4	5	5	5	5
2	Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional	Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
3	Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya	Indeks Reformasi Hukum	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50
		Indeks Kualitas Kebijakan	72,00	72,00	74,00	74,00	76,00

Target Rencana Strategis Tahun 2025–2029 pada sasaran “Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien” menunjukkan adanya peningkatan tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi dari nilai 4 pada tahun 2025 menjadi 5 mulai tahun 2026 dan dipertahankan hingga 2029. Hal ini menggambarkan bahwa tahun 2025 difokuskan sebagai fase penguatan dan penyempurnaan implementasi sistem kerja, sementara pada tahun-tahun berikutnya diharapkan telah tercapai tingkat kematangan optimal. Konsistensi pada level tertinggi tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Pada sasaran “Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional”, target predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan pada kategori “Informatif” secara konsisten selama lima tahun. Penetapan target ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan standar tertinggi dalam keterbukaan informasi serta menjaga reputasi kelembagaan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung citra dan kredibilitas Badan Pusat Statistik sebagai institusi yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, pada sasaran “Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya”, Indeks Reformasi Hukum menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 98,10 pada tahun 2025 menjadi 98,50 pada tahun 2029. Meskipun nilai indeks sudah berada pada kategori sangat tinggi, peningkatan secara gradual setiap tahun mencerminkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam harmonisasi regulasi, kepatuhan hukum, serta efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan organisasi.

Adapun Indeks Kualitas Kebijakan ditargetkan meningkat secara bertahap dari 72,00 pada periode 2025–2026 menjadi 74,00 pada 2027–2028, dan mencapai 76,00 pada tahun 2029. Pola ini menunjukkan adanya tahapan penguatan kualitas perumusan kebijakan, baik dari sisi substansi maupun proses penyusunannya. Secara keseluruhan, target Renstra 2025–2029 menggambarkan kombinasi antara upaya mempertahankan capaian optimal dan strategi peningkatan kualitas secara sistematis dan terukur.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum telah menetapkan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Target tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis 2025–2029. Dokumen ini mencerminkan komitmen Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum kepada Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik untuk memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan organisasi.

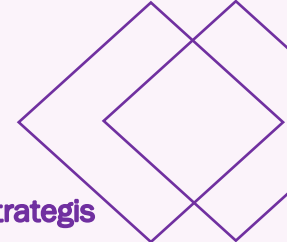
Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan tiga sasaran kegiatan utama beserta indikator dan target capaiannya. Pada sasaran “Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien”, indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi ditargetkan mencapai nilai 4. Target ini mencerminkan fokus pada penguatan implementasi sistem kerja yang adaptif dan kolaboratif sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi.

Pada sasaran “Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional”, indikator Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan memperoleh kategori “Informatif”. Target tersebut menunjukkan komitmen untuk mempertahankan standar tertinggi dalam pengelolaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik, sekaligus menjaga reputasi kelembagaan.

Sementara itu, pada sasaran “Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya”, ditetapkan dua indikator, yaitu Indeks Reformasi Hukum dengan target 98,10 dan Indeks Kualitas Kebijakan dengan target 72,00. Penetapan target ini menggambarkan upaya menjaga kualitas tata kelola regulasi pada tingkat yang sangat baik, sekaligus mendorong peningkatan mutu perumusan dan implementasi kebijakan secara bertahap dan terukur. Adapun tabel penetapan kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 untuk masing-masing indikator sasaran disajikan sebagai berikut..

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Poin	4
SK2	Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional	Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif
SK3	Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,10
		Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	72,00



2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan, komunikasi publik, serta produk hukum yang dihasilkan selaras dengan arah pembangunan nasional. Dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 tidak hanya diwujudkan melalui program teknis, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, transparansi informasi publik, serta harmonisasi regulasi di lingkungan Badan Pusat Statistik. Peran ini menjadi penting karena kualitas komunikasi dan regulasi yang baik akan menentukan tingkat kepercayaan publik, efektivitas koordinasi kelembagaan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas statistik.

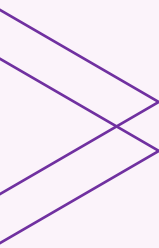
Dalam konteks Prioritas Nasional, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mendukung penguatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan akuntabel. Pengelolaan komunikasi publik dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan penyampaian kebijakan dan hasil statistik dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, fungsi hukum diarahkan pada penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi agar selaras dengan dinamika kebijakan nasional serta kebutuhan organisasi.

Terhadap Prioritas Presiden, khususnya yang berkaitan dengan transformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepercayaan publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berkontribusi melalui penguatan manajemen isu, mitigasi risiko komunikasi, serta peningkatan kualitas advokasi dan pendampingan hukum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan strategis dapat dikomunikasikan secara efektif dan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga mendukung stabilitas kelembagaan dan keberlanjutan program pembangunan.

Sementara itu, dalam merespons Isu Strategis Nasional Tahun 2025, termasuk perkembangan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terus melakukan penyesuaian pendekatan kerja. Optimalisasi kanal komunikasi digital, peningkatan literasi publik terhadap statistik resmi, serta penguatan sistem dokumentasi dan diseminasi produk hukum menjadi bagian dari strategi untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, dukungan yang diberikan tidak bersifat administratif semata, melainkan substantif dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola serta reputasi kelembagaan secara berkelanjutan..

Tabel 4. Dukungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

No	Agenda	Kebijakan/Program	Bentuk Dukungan Biro Humas dan Hukum
A. Prioritas Nasional			
1	Pembinaan Statistik Sektoral	Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan publikasi kebijakan pembinaan statistik sektoral. • Pengelolaan komunikasi kelembagaan dengan K/L/Pemda. • Telaahan dan harmonisasi regulasi pembinaan statistik sektoral sesuai amanat



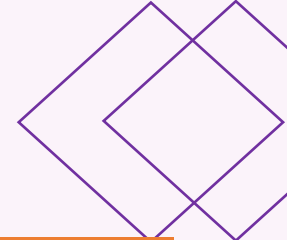
No	Agenda	Kebijakan/Program	Bentuk Dukungan Biro Humas dan Hukum
			<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan reviu perjanjian kerja sama terkait pembinaan statistik.
2	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	Rilis IHK dan Inflasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan hubungan media dan penyusunan narasi tunggal rilis inflasi. • Diseminasi publikasi resmi melalui kanal komunikasi BPS. • Penguatan tata kelola informasi publik dan mitigasi risiko misinterpretasi data.
3	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi	Optimalisasi MPD dan data alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Telaahan hukum terkait pemanfaatan Big Data dan perlindungan data. • Penyusunan draft kerja sama pemanfaatan data dengan pihak ketiga. • Komunikasi publik terkait inovasi metodologi statistik berbasis Big Data.
B. Prioritas Presiden			
4	Inpres 4 Tahun 2025	DTSEN	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan komunikasi publik atas integrasi data sosial ekonomi. • Fasilitasi penyusunan regulasi dan nota kesepahaman antarinstansi. • Penguatan tata kelola dan kepatuhan perlindungan data.
5	Inpres 6 Tahun 2025	Survei KSA Padi dan Ubinan Padi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan hukum dalam pelaksanaan survei strategis. • Penyusunan dan reviu dokumen kerja sama dan aspek legal survei. • Diseminasi informasi dan pengelolaan komunikasi publik terkait data produksi padi.
6	Inpres 8 Tahun 2025	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komunikasi publik hasil penghitungan kemiskinan ekstrem. • Telaahan hukum kebijakan pendukung integrasi data kemiskinan. • Koordinasi komunikasi lintas kementerian/lembaga.
7	Program Makan Bergizi Gratis	Survei Monitoring dan Evaluasi MBG	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penyusunan perjanjian kerja sama survei. • Pengelolaan publikasi dan komunikasi hasil survei. • Penguatan aspek legal perlindungan responden dan kerahasiaan data.
C. Isu Strategis Nasional			

No	Agenda	Kebijakan/Program	Bentuk Dukungan Biro Humas dan Hukum
8	Perpres 12 Tahun 2025	Survei Kesejahteraan Petani (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan komunikasi publik hasil IKP. • Telaahan dan harmonisasi regulasi kerja sama dengan Kementerian Pertanian. • Pendampingan aspek hukum dalam pelaksanaan survei.
9	UU 16 Tahun 1997	Sensus Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan strategi komunikasi publik dan manajemen isu. • Penyusunan regulasi internal dan reviu dokumen kerja sama. • Mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan sensus.
10	Neraca Arus Energi & Emisi GRK	Penyusunan neraca berbasis SEEA	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerja sama dan MoU lintas K/L. • Telaahan hukum integrasi data administratif. • Diseminasi komunikasi strategis terkait statistik lingkungan.
11	Perpres 61 Tahun 2024 & Perpres 17 Tahun 2025	Data Komoditas Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan komunikasi publik terkait ketersediaan data komoditas. • Pendampingan penyusunan regulasi dan kerja sama data komoditas. • Penguatan tata kelola informasi untuk mendukung stabilitas pangan nasional.

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Biro Humas dan Hukum memperoleh alokasi anggaran (pagu) yang ditetapkan dalam DIPA sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi. Pagu tersebut merupakan batas maksimal anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai belanja barang, perjalanan dinas, serta kegiatan substantif dan pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Humas dan Hukum. Dari total pagu yang dialokasikan, terdapat bagian anggaran yang secara langsung mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025. Dengan demikian, pagu yang disajikan pada bagian ini menggambarkan keseluruhan kapasitas fiskal yang dimiliki serta proporsi anggaran yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Biro Humas dan Hukum Tahun 2025.

Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 (dalam juta rupiah)

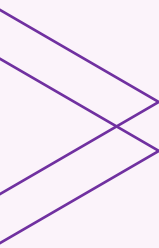


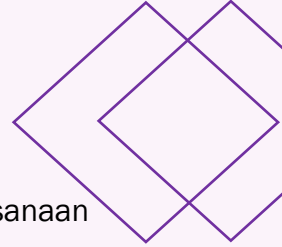
Klasifikasi Rincian Output(KRO)/ Rincian Output (RO)	Pagu Awal		Pagu Akhir		Self Blocking	Pagu yang dapat digunakan
	Pagu Awal	% terhadap Pagu Total	Pagu Akhir	% terhadap Pagu Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	373,55	0,54	0,00	373,55
Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi	2.571,60	7,60	37.522,40	54,07	8.035,99	29.486,40
Layanan Hukum	10.071,92	29,76	348,12	0,5	0,00	348,12
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.975,29	11,74	1.486,01	2,14	15,16	1.470,85
Layanan Protokoler	1.164,57	3,44	208,74	0,30	0,00	208,74
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.297,75	9,74	13.035,40	18,79	0,00	13.035,40
Layanan Bantuan Hukum	601,12	1,78	328,70	0,47	0,00	328,70
Layanan Perkantoran	6.800,60	20,09	15.635,44	22,53	935,35	14.700,09
Layanan Sosialisasi	5.365,37	15,85	451,70	0,65	0,00	451,70
Total Pagu Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	33.848,24	100,00	69.390,05	100,00	8.986,50	60.403,55

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dinamika alokasi anggaran yang cukup signifikan antara pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2025. Total pagu Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum meningkat dari Rp33.848,24 juta menjadi Rp69.390,05 juta atau meningkat lebih dari dua kali lipat. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh penambahan alokasi pada beberapa Rincian Output strategis yang mendukung agenda prioritas organisasi.

Rincian Output dengan alokasi pagu akhir terbesar adalah **Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi** sebesar Rp37.522,40 juta atau 54,07% dari total pagu akhir. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap publikasi dan pelaporan Sensus Ekonomi menjadi fokus utama belanja tahun 2025. Namun demikian, terdapat self blocking sebesar Rp8.035,99 juta pada output ini sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi Rp29.486,40 juta.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**, dari Rp3.297,75 juta (9,74%) pada pagu awal menjadi Rp13.035,40 juta (18,79%) pada pagu akhir. Peningkatan ini mencerminkan penguatan fungsi manajerial, tata kelola, serta





dukungan internal biro dalam rangka menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program.

Sementara itu, beberapa output mengalami penurunan alokasi dibanding pagu awal, antara lain **Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Protokoler, dan Layanan Sosialisasi**. Penyesuaian ini mengindikasikan adanya realokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan prioritas yang lebih mendesak pada tahun berjalan. Meskipun demikian, seluruh layanan inti tetap memperoleh alokasi untuk menjamin keberlangsungan fungsi dukungan hukum, kehumasan, dan protokoler.

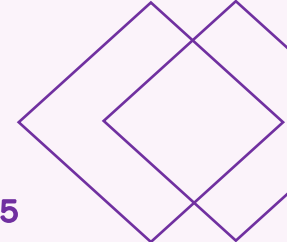
Self blocking tercatat sebesar Rp8.986,50 juta atau sekitar 12,95% dari pagu akhir. Dengan demikian, pagu yang efektif dapat digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.403,55 juta. Pagu efektif inilah yang menjadi basis analisis efisiensi dan efektivitas dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025.

Secara keseluruhan, komposisi pagu menunjukkan adanya penajaman prioritas pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap agenda strategis organisasi, dengan tetap menjaga keseimbangan dukungan operasional dan tata kelola internal.





Bab III. Akuntabilitas Kinerja



3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus dalam mencapai sasaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan kinerja. Evaluasi tersebut tidak hanya menitikberatkan pada tingkat pencapaian output dan *outcome*, tetapi juga mencakup telaah komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja, baik yang berperan sebagai pendorong maupun sebagai kendala.

Melalui pendekatan evaluatif tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dapat mengidentifikasi area perbaikan, memperkuat praktik yang telah berjalan efektif, serta merumuskan langkah strategis yang lebih terukur untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Akuntabilitas kinerja ini sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap profesionalisme dan transparansi pengelolaan tugas dan fungsi biro, dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum tercatat sebesar 105,23 persen, yang menunjukkan bahwa secara agregat target kinerja telah terlampaui. Berdasarkan sasaran kegiatan, capaian tersebut dirinci sebagai berikut.

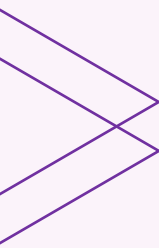
Tabel 6. Rata-rata Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2025

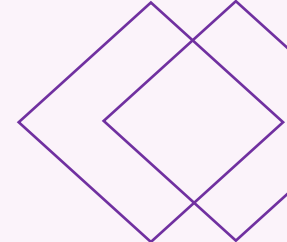
No	Sasaran Kegiatan	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SK1	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien	1	100
SK2	Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional	1	100
SK3	Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya	2	110,46
Rata-rata Capaian Kinerja			105,23

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sasaran kegiatan berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan pada aspek penguatan produk hukum dan regulasi terjadi kinerja yang melampaui ekspektasi. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan konsistensi pengendalian kinerja sepanjang tahun 2025.

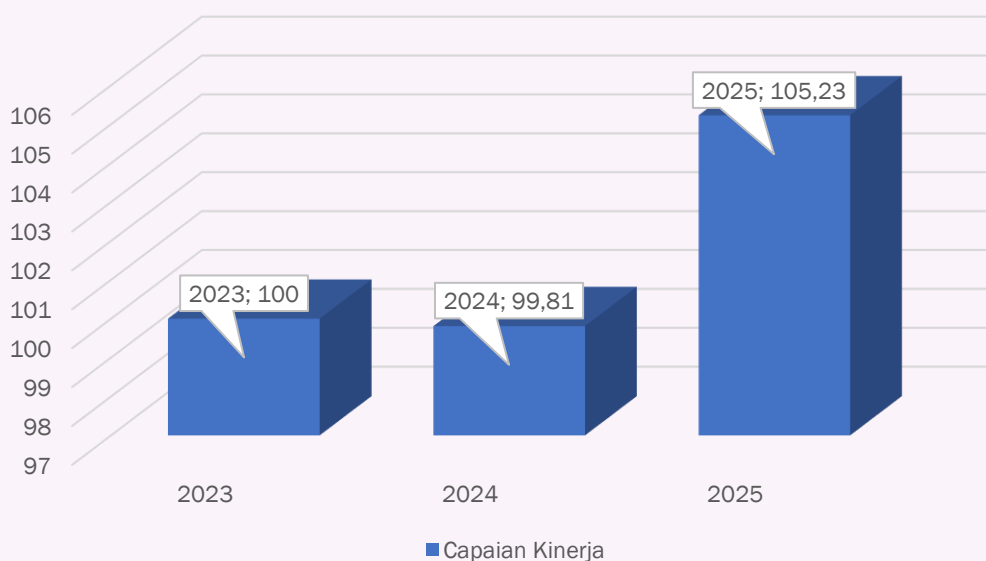
a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023–2025 disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi dan perkembangan kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam tiga tahun terakhir. Analisis ini penting untuk menilai stabilitas pencapaian target, mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan, serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Grafik berikut menyajikan data perbandingan capaian kinerja dimaksud.





Capaian Kinerja Tahun 2023-2025



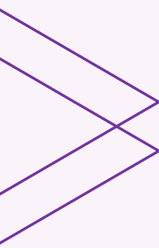
Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2023-2025

Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2023 capaian kinerja berada pada angka 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi program kerja. Pada tahun 2024, capaian kinerja tercatat sebesar 99,81 persen. Meskipun terjadi penurunan tipis sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya, secara substantif kinerja masih berada pada level sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian dan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian sebesar 105,23 persen. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tidak hanya memenuhi target, tetapi melampauinya. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penguatan strategi pelaksanaan program, optimalisasi sumber daya, serta perbaikan dalam manajemen kinerja.

Secara keseluruhan, tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 menunjukkan performa yang konsisten pada tingkat tinggi dengan akselerasi positif pada tahun 2025, yang menandakan adanya peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

b. Nilai PKO beserta predikat dan interpretasi

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan instrumen strategis dalam kerangka manajemen kinerja yang berfungsi untuk menilai tingkat efektivitas implementasi sistem akuntabilitas serta capaian kinerja organisasi secara terintegrasi. PKO tidak hanya merepresentasikan angka capaian semata, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan pengukuran indikator, konsistensi pelaksanaan program, serta efektivitas mekanisme evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Penetapan nilai dan predikat PKO Tahun 2025 didasarkan pada hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagaimana tercantum dalam kertas kerja monitoring Triwulan IV, dengan komponen Nilai SAKIP yang digunakan adalah Nilai SAKIP Tahun 2025.





Gambar 11. Nilai PKO Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memperoleh nilai PKO sebesar 92,46. Mengacu pada klasifikasi predikat PKO, nilai dalam rentang $80\% < X \leq 100\%$ termasuk dalam kategori **BAIK**. Nilai ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif dan kualitatif, kinerja organisasi berada pada tingkat yang tinggi, dengan pencapaian target yang selaras dengan perencanaan serta pengelolaan kinerja yang terkendali dan sistematis sepanjang tahun berjalan.

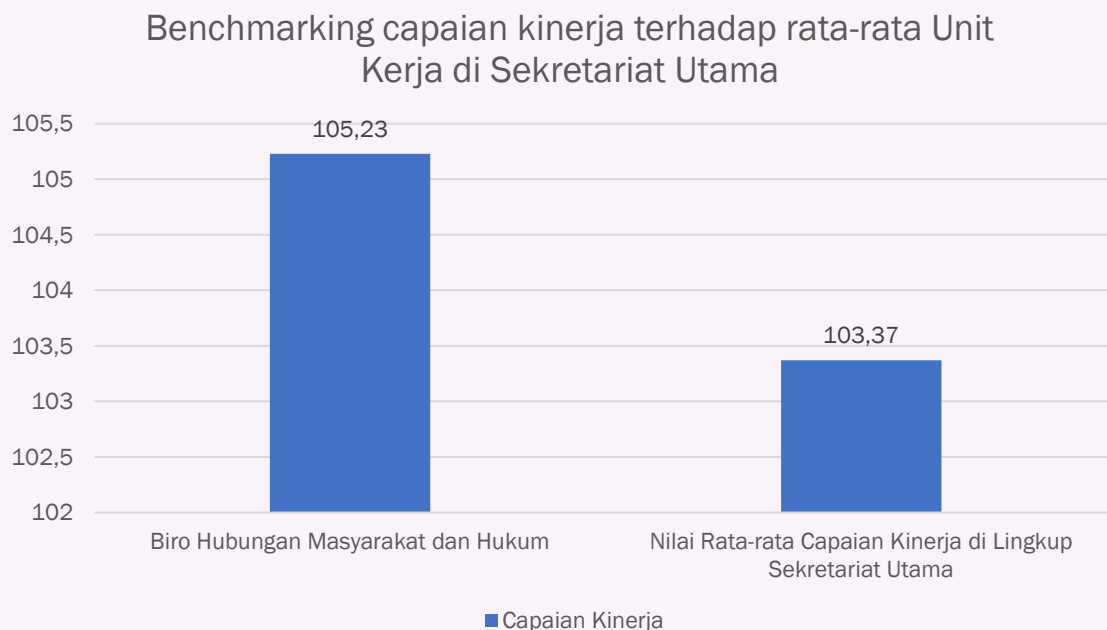
Sesuai dengan interpretasi predikat PKO, kategori **BAIK** mengandung makna bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja organisasi telah sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi. Artinya, proses cascading kinerja dari level strategis ke operasional telah berjalan efektif, indikator kinerja utama telah dirumuskan secara relevan dan terukur, serta realisasi program dan kegiatan mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi secara optimal. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi telah dimanfaatkan secara fungsional sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan penguatan akuntabilitas.

Secara substantif, capaian nilai 92,46 mencerminkan kematangan (*maturity*) tata kelola kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum yang telah terbangun dengan baik. Praktik manajemen kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi instrumen pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Ke depan, tantangan strategis yang perlu diantisipasi adalah menjaga konsistensi kualitas implementasi, memperluas inovasi dalam pengelolaan kinerja, serta memastikan bahwa capaian yang tinggi tersebut terus menghasilkan dampak nyata (*outcome*) bagi peningkatan kualitas layanan dan kontribusi organisasi secara keseluruhan.

c. Benchmarking capaian kinerja terhadap rata-rata Unit Kerja di Sekretariat Utama

Berdasarkan data capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mencatat Nilai Capaian Kinerja (Capkin) sebesar 105,23, sementara rata-rata capaian kinerja untuk benchmarking pada level Eselon I/Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama sebesar 103,37. Dengan demikian, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berada 1,86 poin di atas rata-rata *benchmarking*, yang

menunjukkan performa relatif lebih baik dibandingkan agregasi satuan kerja lainnya pada level yang sama.



Gambar 12. Benchmarking capaian kinerja terhadap rata-rata Unit Kerja Sekretariat Utama Tahun 2025

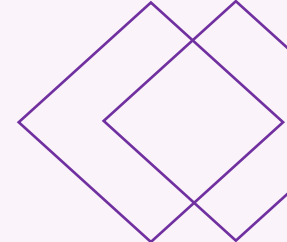
Capaian tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, konsistensi pengendalian kinerja, serta optimalisasi sumber daya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum telah berjalan secara sangat baik. Secara komparatif, posisi ini memperlihatkan daya saing kinerja yang kuat, sekaligus mencerminkan kontribusi signifikan biro terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Meskipun demikian, pendekatan *benchmarking* tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan posisi relatif, tetapi juga untuk mengidentifikasi ruang peningkatan (*area of improvement*). Beberapa langkah strategis yang dapat terus diperkuat antara lain: (1) peningkatan kualitas *outcome* program kehumasan dan hukum agar selaras dengan dampak strategis organisasi; (2) penguatan integrasi antara perencanaan kinerja dan manajemen risiko; (3) optimalisasi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data; serta (4) pengembangan inovasi layanan yang mendukung efektivitas komunikasi publik dan penguatan regulasi.

Secara keseluruhan, posisi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum yang melampaui rata-rata *benchmarking* menunjukkan kinerja yang kompetitif dan terkelola dengan baik, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

d. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Berdasarkan data capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mencatat Nilai Capaian Kinerja (Capkin) sebesar 105,23, sementara rata-rata capaian kinerja untuk benchmarking pada level Eselon I/Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama sebesar 103,37. Dengan demikian, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berada 1,86 poin di atas rata-rata *benchmarking*.



Tabel 7. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien											
	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	4	4	N/A (Belum dijadikan indikator)	4	4	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	100
Sasaran 2. Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional											
	Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	N/A (Belum dijadikan indikator)	Informatif	Informatif	N/A (Belum dijadikan indikator)	Kurang Informatif	Informatif	N/A (Belum dijadikan indikator)	55,92	100,00
Sasaran 3. Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya											
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	75	98,10	N/A (Belum dijadikan indikator)	98,06	99,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	120,00	100,92
	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	75	72,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	70,69	87,40	N/A (Belum dijadikan indikator)	94,25	120,00

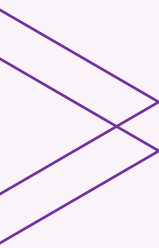
Tabel tersebut menggambarkan perkembangan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum selama periode 2023–2025 berdasarkan tiga sasaran utama, beserta indikator kinerja yang digunakan. Perlu dicatat bahwa sebagian indikator belum dijadikan indikator kinerja pada tahun 2023, sehingga pengukuran secara kuantitatif baru efektif dilakukan mulai tahun 2024.

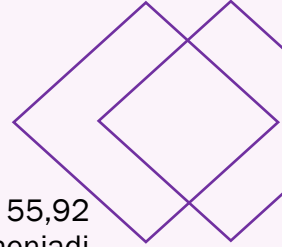
Sasaran 1: Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Indikator yang digunakan adalah Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pada tahun 2024 dan 2025, target yang ditetapkan sebesar 4 poin dan realisasi juga mencapai 4 poin pada kedua tahun tersebut, sehingga capaian kinerja tercatat 100 persen. Konsistensi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem kerja berbasis penyederhanaan birokrasi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu dipertahankan secara stabil. Hal ini mengindikasikan adanya kematangan dalam penerapan pola kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional

Indikator yang digunakan adalah Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah predikat “Informatif”, namun





realisasi berada pada kategori “Kurang Informatif” dengan capaian kinerja sebesar 55,92 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara target dan realisasi, yang menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Pada tahun 2025, target tetap dipertahankan pada predikat “Informatif” dan berhasil direalisasikan sesuai target, dengan capaian kinerja mencapai 100 persen. Peningkatan signifikan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, khususnya dalam penguatan tata kelola layanan informasi publik, peningkatan kualitas respons terhadap permohonan informasi, serta optimalisasi pengelolaan kanal komunikasi publik.

Sasaran 3: Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya

Sasaran ini diukur melalui dua indikator, yaitu Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan.

Untuk Indeks Reformasi Hukum, pada tahun 2024 target sebesar 75 poin dengan realisasi 98,06 poin, sehingga capaian kinerja mencapai 120,00 persen. Pada tahun 2025, target meningkat menjadi 98,10 poin dengan realisasi 99,00 poin dan capaian sebesar 100,92 persen. Capaian yang melampaui target dalam dua tahun berturut-turut menunjukkan adanya penguatan signifikan dalam harmonisasi regulasi, kepatuhan terhadap standar pembentukan peraturan, serta implementasi reformasi hukum yang lebih terstruktur.

Sementara itu, pada Indeks Kualitas Kebijakan, tahun 2024 menunjukkan capaian 94,25 persen (target 75 poin, realisasi 70,69 poin), yang berarti belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan substansial, dengan target 72,00 poin dan realisasi 87,40 poin sehingga capaian mencapai 120,00 persen. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas perumusan kebijakan, penguatan basis eviden dalam penyusunan regulasi, serta peningkatan konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan.

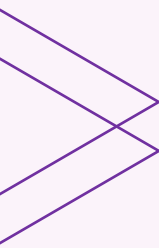
Secara keseluruhan, tren kinerja selama periode 2024–2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan, khususnya pada aspek penguatan hubungan kelembagaan dan kualitas kebijakan. Konsistensi capaian pada Sasaran 1 serta peningkatan tajam pada Sasaran 2 dan 3 mencerminkan adanya proses pembelajaran organisasi dan penguatan tata kelola yang berdampak positif terhadap kualitas kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

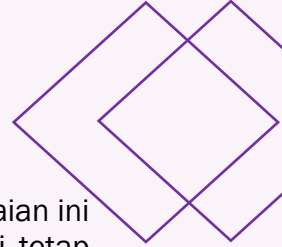
e. Analisis Capaian Kinerja per Indikator

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Renstra Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum seluruh indikator kinerja Biro Humas dan Hukum mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini mencerminkan konsistensi tata kelola kinerja, penguatan koordinasi lintas fungsi, serta peningkatan kualitas manajemen bukti dukung dalam menghadapi dinamika evaluasi eksternal.

Meskipun demikian, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan administratif, teknis, maupun substansial yang memerlukan penanganan strategis dan berkelanjutan. Berikut adalah analisis per indikator.

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi





Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,0 dan realisasi tercapai 4,0 (100%). Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem kerja hasil penyederhanaan birokrasi tetap berada pada level yang diharapkan.

Sepanjang tahun berjalan, tantangan utama terletak pada proses validasi dan kelengkapan data dukung pembentukan 23 BPS Kabupaten/Kota serta harmonisasi proses bisnis lintas unit. Selain itu, terdapat kebutuhan sinkronisasi dokumen dengan kebijakan Kementerian PANRB agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam penilaian.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% didukung oleh intensifikasi koordinasi internal, penetapan penanggung jawab pada setiap tahapan validasi dokumen, serta percepatan komunikasi dengan kementerian pembina. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manajerial dan pengendalian proses telah berjalan efektif.

2. Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Target tahun 2025 adalah memperoleh predikat “Informatif”, dan realisasi menunjukkan predikat tersebut berhasil diperoleh (100%). Keberhasilan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Namun demikian, proses pencapaiannya menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan SDM, keterlambatan penyampaian dokumen oleh unit kerja, serta dinamika pengelolaan opini publik yang memerlukan respons cepat dan terukur.

Upaya yang dilakukan meliputi pembentukan sub-tim kecil untuk percepatan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), briefing intensif bagi petugas PPID, penguatan koordinasi lintas unit, serta penyempurnaan materi paparan uji publik. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga kualitas layanan informasi publik.

3. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

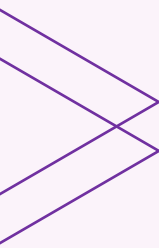
Target IRH tahun 2025 sebesar 98,10 dan berhasil direalisasikan sebesar 99,00 dengan capaian kinerja 100,92%. Nilai ini menunjukkan bahwa tata kelola regulasi dan penguatan sistem hukum internal berada pada level sangat baik.

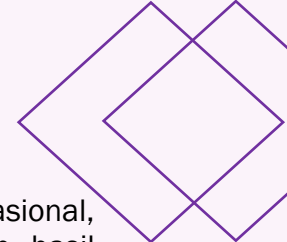
Tantangan utama terletak pada harmonisasi rancangan peraturan, penyesuaian variabel penilaian JDIH, serta koordinasi pembahasan RUU Statistik dengan pihak eksternal. Perubahan instrumen evaluasi juga menuntut adaptasi cepat dalam penyusunan bukti dukung.

Solusi dilakukan melalui pembahasan lanjutan dengan unit pemrakarsa, penyusunan dokumen sanggah secara komprehensif, serta koordinasi aktif dengan Kementerian Hukum dan HAM serta BPHN. Capaian ini mencerminkan kematangan sistem pengelolaan regulasi yang adaptif dan responsif.

4. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Target IKK tahun 2025 sebesar 72,00 dan berhasil direalisasikan sebesar 87,40 dengan capaian 120%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan kualitas perumusan kebijakan berbasis evaluasi dan evidence-based policy.





Kendala yang muncul terutama terkait perubahan instrumen penilaian nasional, ketidaksesuaian data dukung awal, serta keterlambatan klarifikasi terhadap hasil evaluasi. Namun, melalui penyusunan dokumen sanggah yang kuat, koordinasi dengan LAN, serta penyesuaian terhadap variabel terbaru, nilai akhir berhasil meningkat secara signifikan.

Capaian di atas target ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas analitis dan kualitas tata kelola kebijakan di lingkungan Biro Humas dan Hukum.

Berikut rangkuman kendala utama dan solusi yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

Tabel 8. Kendala dan Solusi per Indikator Kinerja Tahun 2025

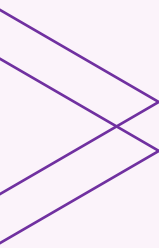
Indikator	Kendala Utama 2025	Solusi yang Dilakukan
Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	Validasi dan kelengkapan data dukung pembentukan BPS; proses bisnis belum sepenuhnya sinkron	Koordinasi intensif dengan KemenPANRB; penetapan PIC validasi; percepatan harmonisasi dokumen
Keterbukaan Informasi Publik	Keterbatasan SDM; keterlambatan dokumen unit; tantangan pengelolaan opini publik	Pembentukan sub-tim percepatan; briefing PPID; sinkronisasi LKE; penguatan materi uji publik
Indeks Reformasi Hukum	Harmonisasi regulasi lintas unit; perubahan variabel penilaian; koordinasi eksternal	Pembahasan lanjutan regulasi; penyusunan sanggah; koordinasi dengan Kemenkum/BPHN
Indeks Kualitas Kebijakan	Perubahan instrumen penilaian; bukti dukung belum optimal	Penyesuaian dokumen terhadap instrumen baru; koordinasi dengan LAN; penguatan validasi

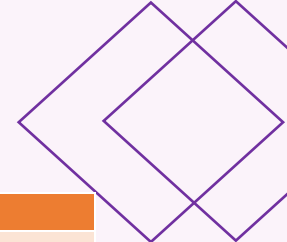
Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kendala bersifat koordinatif dan administratif, bukan pada aspek substansi kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa fondasi tata kelola sudah kuat, namun memerlukan penguatan sistem dokumentasi dan integrasi data.

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja berkelanjutan, hasil monitoring tahun 2025 telah dirumuskan menjadi rencana tindak lanjut tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Tindak Lanjut per Indikator Kinerja tahun 2025

Indikator	Rencana Tindak Lanjut 2026
Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	Koordinasi awal penyusunan proses bisnis; harmonisasi dengan kebijakan KemenPANRB; pemutakhiran dokumen sistem kerja
Keterbukaan Informasi Publik	Penyempurnaan bahan paparan uji publik; penguatan peran PPID; peningkatan kapasitas SDM pelayanan informasi
Indeks Reformasi Hukum	Penguatan tata kelola JDIH; pelaporan berkala ke BPHN; pendampingan harmonisasi regulasi





Indikator	Rencana Tindak Lanjut 2026
Indeks Kualitas Kebijakan	Sosialisasi tata kelola kebijakan; peningkatan kualitas analisis kebijakan; menghadirkan narasumber strategis untuk persiapan evaluasi 2026

Rencana tindak lanjut ini menekankan pada penguatan sistemik dan preventif, bukan sekadar korektif, sehingga capaian tahun 2026 diharapkan lebih stabil dan berkelanjutan.

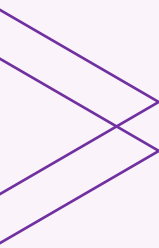
Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dengan seluruh indikator mencapai atau melampaui target. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi internal, adaptasi terhadap perubahan instrumen evaluasi, serta peningkatan kualitas dokumentasi kinerja. Ke depan, fokus perbaikan diarahkan pada integrasi sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan tata kelola berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, Biro Humas dan Hukum memiliki landasan yang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026.

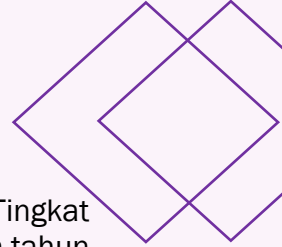
3.2. Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra

Tabel 10. Capaian Kinerja per Indikator Kinerja terhadap Target Renstra 2025 dan 2029

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien						
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Poin	4	5	4	100	80
Sasaran 2. Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional						
Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	100	100
Sasaran 3. Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya						
Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,10	98,50	99,00	100,92	100,51
Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	72	76	87,40	120,00	115,00

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh indikator strategis telah mencapai bahkan melampaui target tahunan, serta menunjukkan posisi yang sangat kuat terhadap target akhir Renstra 2029. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi program dan kegiatan berjalan efektif serta didukung oleh sistem manajemen kinerja yang relatif matang.





Pada Sasaran Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien, indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi ditargetkan sebesar 4 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 5 pada tahun 2029. Realisasi tahun 2025 mencapai nilai 4 atau 100% terhadap target tahunan. Namun, apabila dibandingkan dengan target akhir 2029, capaian tersebut baru berada pada 80%. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi sistem kerja telah terbentuk dan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, tetapi peningkatan menuju level kematangan tertinggi masih memerlukan penguatan, terutama dalam integrasi proses bisnis lintas unit, optimalisasi implementasi struktur organisasi hasil penyederhanaan, serta peningkatan efektivitas pengukuran kinerja berbasis outcome.

Pada Sasaran Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional, indikator Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan capaian yang stabil. Target tahun 2025 dan 2029 sama-sama ditetapkan pada predikat “Informatif”, dan realisasi tahun 2025 berhasil mempertahankan predikat tersebut. Dengan demikian, capaian terhadap target 2025 maupun 2029 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan konsistensi tata kelola pelayanan informasi publik serta keberlanjutan komitmen transparansi. Namun karena target akhir tidak mengalami eskalasi, tantangan ke depan bukan lagi pada pencapaian predikat, melainkan pada peningkatan kualitas layanan, inovasi kanal komunikasi, serta penguatan reputasi kelembagaan.

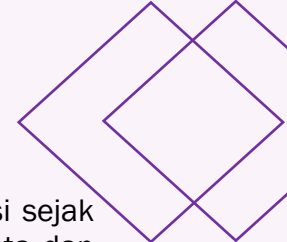
Pada Sasaran Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya, capaian kinerja menunjukkan performa yang sangat progresif. Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang ditargetkan sebesar 98,10 pada tahun 2025 dan 98,50 pada tahun 2029, berhasil direalisasikan sebesar 99,00. Artinya, capaian terhadap target 2025 mencapai 100,92%, dan terhadap target 2029 mencapai 100,51%. Dengan demikian, target akhir periode telah terlampaui lebih awal. Kondisi ini mencerminkan kematangan tata kelola regulasi, efektivitas harmonisasi peraturan, serta penguatan sistem dokumentasi hukum yang adaptif terhadap perubahan instrumen evaluasi nasional.

Hal serupa terjadi pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Target tahun 2025 sebesar 72 dan target 2029 sebesar 76, sedangkan realisasi tahun 2025 mencapai 87,40. Capaian terhadap target tahunan mencapai 120%, dan terhadap target akhir Renstra mencapai 115%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas perumusan kebijakan berbasis bukti, evaluasi kebijakan yang lebih sistematis, serta perbaikan kualitas dokumen pendukung. Secara strategis, kondisi ini menempatkan organisasi pada posisi yang sangat baik, namun juga menuntut konsistensi agar tidak terjadi penurunan akibat perubahan metodologi penilaian di tingkat nasional.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mendorong ketercapaian target tersebut. Digitalisasi proses kerja dan penguatan sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan bukti dukung. Koordinasi lintas unit yang semakin solid memungkinkan percepatan penyelesaian dokumen dan sinkronisasi substansi kebijakan. Kualitas SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan instrumen evaluasi, serta perencanaan dan monitoring kinerja yang dilakukan secara berkala, turut menjadi determinan utama dalam menjaga konsistensi capaian.

Di sisi lain, terdapat faktor yang berpotensi menghambat keberlanjutan capaian tersebut. Ketidakpastian kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi dukungan operasional dan kapasitas penguatan sistem. Perubahan instrumen dan metodologi





penilaian nasional berisiko menimbulkan fluktuasi nilai apabila tidak diantisipasi sejak awal. Selain itu, ketergantungan pada kontribusi unit lain dalam pemenuhan data dan dokumen pendukung juga menjadi tantangan koordinatif. Untuk indikator sistem kerja, kebutuhan peningkatan menuju level kematangan yang lebih tinggi masih memerlukan perhatian khusus agar target 2029 dapat tercapai secara optimal.

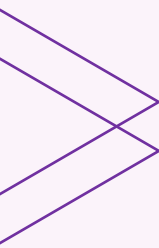
Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan akselerasi yang kuat dan memberikan posisi awal yang sangat baik menuju akhir periode Renstra. Tantangan ke depan tidak hanya pada mempertahankan capaian angka, tetapi pada menjaga kualitas, konsistensi, dan ketahanan sistem terhadap dinamika kebijakan eksternal.

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Sepanjang Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional melalui fungsi komunikasi publik, harmonisasi regulasi, pendampingan hukum, serta penguatan tata kelola informasi. Mengingat peran Biro bersifat supporting dalam proses bisnis statistik Badan Pusat Statistik, capaian yang dihasilkan tidak berbentuk output teknis statistik, melainkan dukungan substantif yang memastikan setiap program strategis memiliki landasan hukum yang kuat, komunikasi yang efektif, serta mitigasi risiko yang memadai. Ringkasan capaian, kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Output yang dihasilkan, kendala, solusi dan tindak lanjut berdasarkan kategori tahun 2025

Kategori	Output yang Dihasilkan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
Prioritas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Diseminasi dan publikasi kebijakan penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Pengelolaan komunikasi rilis inflasi, kesejahteraan, dan indikator strategis lainnya. Telaahan dan harmonisasi regulasi pembinaan statistik sektoral dan pemanfaatan Big Data. Penyusunan dan reuiu PKS 	<ul style="list-style-type: none"> Variasi kapasitas statistik sektoral. Kompleksitas materi statistik bagi publik non-teknis. Dinamika regulasi pemanfaatan data alternatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Narasi tunggal dan infografis tematik. Pendampingan hukum preventif. Koordinasi lintas unit dan instansi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan literasi statistik sektoral. Penyempurnaan pedoman hukum data alternatif. Optimalisasi diseminasi digital.



	dengan K/L/Pemda.			
Prioritas Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan komunikasi dan manajemen isu pada DTSEN, survei KSA/Ubinan, kemiskinan ekstrem, dan monitoring MBG. • Pendampingan hukum survei strategis. • Fasilitasi MoU dan regulasi lintas instansi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensitivitas data sosial-ekonomi. • Tingginya ekspektasi publik terhadap data. • Koordinasi lintas K/L yang kompleks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring isu dan media handling. • Reviu hukum preventif dokumen kerja sama. • Penyusunan materi komunikasi publik yang adaptif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan early warning system isu publik. • Standardisasi dokumen hukum survei strategis. • Peningkatan kapasitas crisis communication.
Isu Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan strategi komunikasi dan mitigasi risiko hukum Sensus Ekonomi. • Harmonisasi regulasi survei kesejahteraan petani dan statistik lingkungan (SEEA). • Dukungan komunikasi data komoditas strategis nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi misinterpretasi data sensus. • Tantangan integrasi data administratif. • Tuntutan transparansi digital yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen isu berbasis evidence. • Pendampingan hukum integrasi data. • Penyusunan regulasi internal pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi komunikasi digital berbasis literasi statistik. • Penyempurnaan sistem dokumentasi produk hukum. • Penguatan koordinasi lintas K/L berbasis tata kelola data.

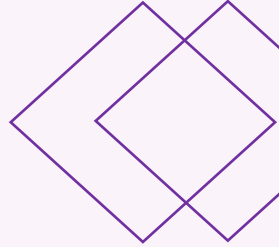
Secara keseluruhan, dukungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Tahun 2025 menunjukkan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih strategis dan preventif. Fungsi komunikasi tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai instrumen manajemen isu dan penguatan reputasi kelembagaan. Demikian pula fungsi hukum tidak terbatas pada reviu dokumen, melainkan diarahkan pada mitigasi risiko dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Ke depan, penguatan kapasitas komunikasi digital, integrasi dokumentasi produk hukum, serta peningkatan sistem deteksi dini isu publik menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap statistik resmi.

3.4. Prestasi dan Inovasi

Tahun 2025 menjadi periode penguatan reputasi kelembagaan dan tata kelola komunikasi publik Badan Pusat Statistik melalui berbagai capaian strategis di bidang kehumasan, keterbukaan informasi, kearsipan, serta kerja sama internasional. Sebagai unit kerja yang memiliki fungsi komunikasi publik dan dukungan hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berkontribusi dalam membangun akuntabilitas komunikasi, meningkatkan kualitas pengelolaan media digital, memperkuat transparansi informasi, serta memastikan tata kelola arsip dan dokumentasi kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Berbagai penghargaan nasional, capaian audit internal, serta partisipasi aktif dalam forum internasional menjadi indikator konkret atas efektivitas strategi komunikasi dan tata kelola hukum yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Tabel 12. Prestasi dan Inovasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025

No	Prestasi/Inovasi	Keterangan
1	Gold Winner Kategori PR Program & Bronze Winner Kategori Social Media Management pada Makaravox UI PR Awards	Pengakuan atas efektivitas program komunikasi publik dan pengelolaan media sosial BPS
2	Top 5 Lembaga Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal (Jan-Mar 2025)	Apresiasi dalam Bimtek Komdigi “Jago Mengelola Media Sosial” atas konsistensi amplifikasi kebijakan nasional
3	Pemimpin Perempuan Terpopuler di Media Sosial (Subkategori Kepala Lembaga) pada Anugerah Humas Indonesia	Pengakuan terhadap kepemimpinan Kepala BPS RI dalam membangun reputasi institusi di ruang digital
4	Terbaik 1 Kategori Website dan Terbaik 2 Kategori Media Audiovisual pada Anugerah Media Humas	Apresiasi atas kualitas pengelolaan website dan konten audiovisual BPS
5	Badan Publik Informatif (Nilai 97,55) pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Pengakuan atas komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik
6	Partisipasi aktif dalam ASEAN Community Statistical System Committee (ACSS15), Melaka	Kontribusi dalam penyepakatan Rencana Aksi ACSS 2026-2030 dan penguatan kolaborasi statistik ASEAN
7	Lead Country Study on Small Area Implementation in ASEAN 2023-2026	Penguatan posisi Indonesia dalam pengembangan metodologi statistik kawasan
8	Chair BIMP-EAGA Socio-Cultural Development WG (2025-2027) dan Chair IMT-GT ITI & Tourism WG (2025-2027)	Peran strategis dalam kerja sama pertumbuhan kawasan ASEAN
9	Nilai Audit Kearsipan Internal 2025 sebesar 95,370 (Kategori AA - Sangat Memuaskan) dan Unit Pengolah Terbaik ke-5	Cerminan tata kelola arsip, dokumentasi, dan manajemen informasi yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan



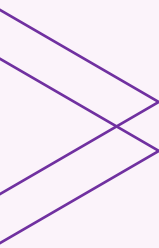
BPS RAIH PENGHARGAAN KEHUMASAN

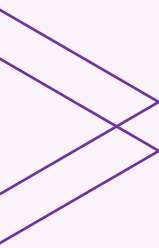
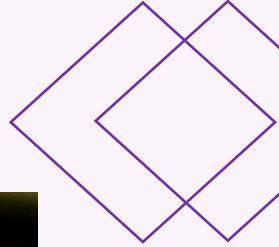
Dalam ajang Makaravox UI PR Awards 2025, BPS meraih penghargaan Gold Winner Kategori PR Program dan Bronze Winner Kategori Social Media Management.

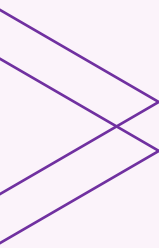
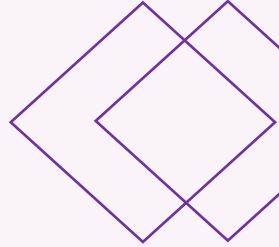
Universitas Indonesia, 20 Mei 2025



bps.go.id









Gambar 13. Prestasi dan Inovasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan konsistensi penguatan fungsi komunikasi publik dan tata kelola hukum yang semakin strategis. Penghargaan di bidang kehumasan dan media digital menegaskan keberhasilan transformasi komunikasi berbasis data dan pengelolaan narasi tunggal yang terintegrasi. Predikat Badan Publik Informatif serta capaian audit kearsipan dengan kategori AA menunjukkan bahwa transparansi dan manajemen informasi tidak hanya dikelola dari sisi eksternal, tetapi juga diperkuat dari sisi tata kelola internal dan kepatuhan administratif.

Di tingkat regional dan internasional, keterlibatan aktif dalam forum statistik ASEAN serta kepemimpinan pada berbagai working group memperlihatkan kontribusi BPS dalam diplomasi statistik dan pengembangan metodologi kawasan. Dukungan komunikasi dan hukum dalam konteks ini tidak hanya memperkuat reputasi domestik, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam ekosistem statistik global.

Dengan demikian, prestasi dan inovasi tahun 2025 mencerminkan peran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum sebagai strategic enabler dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas komunikasi, serta memastikan tata kelola informasi dan regulasi yang berkelanjutan.

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Pada Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan pada penguatan efektivitas organisasi, peningkatan hubungan kelembagaan, serta penguatan produk hukum dan regulasi. Pengukuran

kinerja dilakukan melalui indikator yang terukur dan selaras dengan mandat reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, serta reformasi hukum. Evaluasi capaian dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja, serta menganalisis tingkat realisasi anggaran dan efisiensinya.

Tabel 13. Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Tahun 2025

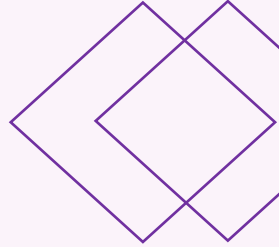
Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Pagu yang dapat digunakan (Juta Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
Sasaran 1. Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien								
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Poin	4	4	100	13.035,40	11.014,89	84,50	1,18
Sasaran 2. Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional								
Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	100	46.691,33	37.256,07	83,99	1,19
Sasaran 3. Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya								
Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,10	99,00	100,92	348,12	330,98	95,08	1,06
Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	72	87,40	120,00	328,70	309,95	94,30	1,27

Secara umum, seluruh indikator kinerja Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan tingkat pencapaian minimal 100 persen dan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Pada Sasaran 1, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi mencapai target maksimal (100%) dengan realisasi anggaran sebesar 84,50 persen dari pagu yang dapat digunakan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan reformasi sistem kerja yang diiringi efisiensi penggunaan anggaran (nilai efisiensi 1,18).

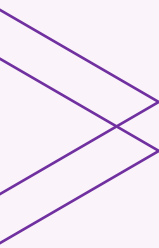
Pada Sasaran 2, predikat **Informatif** dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik berhasil dipertahankan sesuai target, dengan realisasi anggaran sebesar 83,99 persen dan tingkat efisiensi 1,19. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan hubungan kelembagaan dan tata kelola informasi publik dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

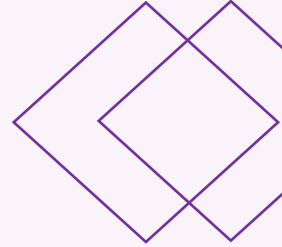
Sementara itu, pada Sasaran 3, indikator Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan menunjukkan kinerja yang melampaui target, masing-masing sebesar 100,92 persen dan 120,00 persen. Capaian tersebut mencerminkan penguatan kualitas regulasi, harmonisasi kebijakan, serta implementasi reformasi hukum yang semakin baik. Dengan tingkat realisasi anggaran di atas 94 persen dan nilai efisiensi di atas 1,00, pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini menunjukkan hubungan yang positif antara capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menggambarkan konsistensi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam mencapai target strategis dengan pengelolaan anggaran yang relatif efisien, sekaligus memperkuat peran sebagai unit pendukung yang berorientasi pada hasil (result-oriented supporting unit) dalam tata kelola organisasi BPS.



Bab IV. Penutup





4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menunjukkan capaian yang sangat baik baik dari sisi output, outcome, maupun pengelolaan anggaran. Seluruh indikator kinerja utama mencapai minimal 100 persen dari target, bahkan pada indikator Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan penguatan tata kelola regulasi, kualitas kebijakan, serta efektivitas pendampingan hukum yang semakin matang.

Dari aspek penguatan hubungan kelembagaan dan keterbukaan informasi publik, predikat Informatif berhasil dipertahankan, yang diperkuat dengan berbagai penghargaan nasional di bidang kehumasan, media digital, dan keterbukaan informasi. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi komunikasi publik telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun reputasi, kepercayaan publik, dan akuntabilitas kelembagaan.

Di sisi tata kelola internal, capaian nilai Audit Kearsipan Internal kategori AA (Sangat Memuaskan) serta efisiensi anggaran pada seluruh sasaran program menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Rata-rata realisasi anggaran berada pada kisaran 83–95 persen dengan nilai efisiensi di atas 1,00, yang mengindikasikan hubungan positif antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran.

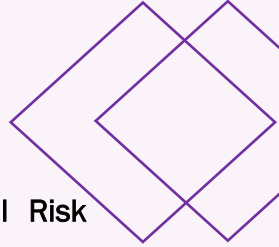
Secara keseluruhan, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025 berhasil menjalankan perannya sebagai strategic enabler dalam mendukung reformasi birokrasi, penguatan regulasi, keterbukaan informasi publik, serta diplomasi statistik nasional dan regional.

4.2. Rekomendasi perbaikan kinerja

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal, terdapat beberapa area penguatan yang dapat menjadi fokus perbaikan ke depan:

- 1. Penguatan Manajemen Isu dan Early Warning System**
Meningkatkan eksposur publik dan intensitas komunikasi digital, diperlukan sistem deteksi dini isu berbasis monitoring media dan analisis sentimen yang lebih terstruktur untuk memitigasi risiko reputasi secara preventif.
- 2. Standardisasi dan Digitalisasi Dokumentasi Produk Hukum**
Untuk mendukung Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan secara berkelanjutan, perlu dilakukan integrasi basis data regulasi dan dokumen hukum dalam satu sistem terdigitalisasi yang mudah ditelusuri dan terdokumentasi secara sistematis.
- 3. Peningkatan Literasi Statistik Publik Berbasis Segmentasi Audiens**
Strategi komunikasi perlu semakin berbasis segmentasi pengguna (policy makers, akademisi, media, masyarakat umum) agar efektivitas diseminasi informasi statistik lebih terukur dan berdampak.
- 4. Optimalisasi Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)**
Meskipun tingkat efisiensi sudah baik, penguatan perencanaan berbasis output dan outcome yang lebih terukur akan meningkatkan ketepatan alokasi sumber daya serta meminimalkan potensi under-spending.





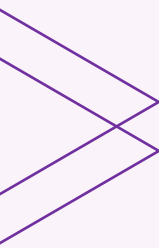
5. **Penguatan Kapasitas SDM di Bidang Komunikasi Strategis dan Legal Risk Management**

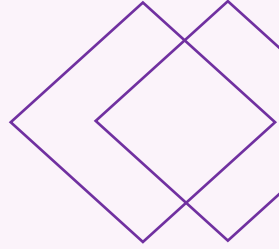
Dinamika kebijakan nasional dan internasional menuntut peningkatan kompetensi SDM dalam crisis communication, regulatory impact analysis, serta harmonisasi regulasi lintas sektor.

6. **Penguatan Sinergi Dukungan terhadap Agenda Internasional**

Peran aktif dalam forum statistik ASEAN dan kepemimpinan working group kawasan perlu diikuti dengan strategi komunikasi internasional yang lebih sistematis guna memperkuat positioning BPS sebagai institusi statistik berkelas global.

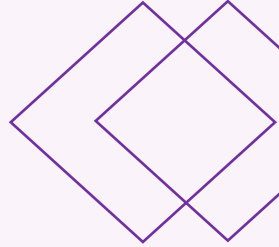
Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum pada tahun berikutnya tidak hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga meningkatkan kualitas dukungan strategis terhadap tata kelola data nasional, reputasi kelembagaan, dan akuntabilitas publik secara berkelanjutan.






Lampiran





1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Reviu 2



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Nashrul Wajidi, SST., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2025
Pihak Pertama

mshurul
Dr. M. Nashrul Wajidi, SST., M.Si
NIP. 19791213200012 1 002

Pihak Kedua

Dr. Pudji Ismartini
Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 147110815199312 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4,00 Poin
2.	Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional	Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
3.	Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya	Indeks Reformasi Hukum	98,10 Poin
4.		Indeks Kualitas Kebijakan	72,00 Poin

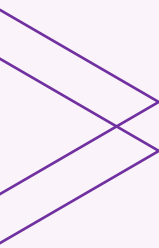
Program/Kegiatan	Anggaran	
1) 2882 Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Rp.	15.485.386.000
Jumlah	Rp.	15.485.386.000

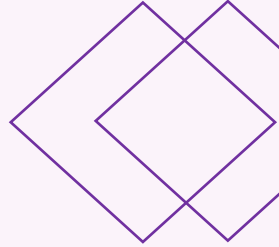
Plt. Sekretaris Utama

Dr. Pudji Ismartini
Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 147110815199312 2 002

Jakarta, 27 Oktober 2025
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

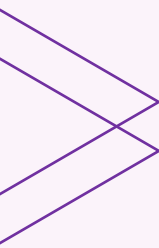
mshurul
Dr. M. Nashrul Wajidi, SST., M.Si
NIP. 19791213200012 1 002

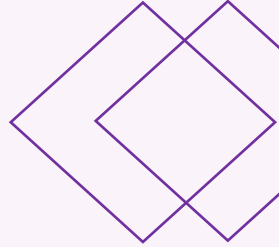




Lampiran II Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

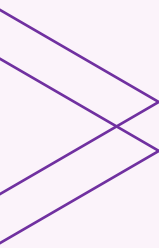
Pendidikan	Jumlah	Persentase
S3	1	1,06%
S2	19	20,21%
S1/DIV	66	70,21%
D3	1	1,06%
SMA	7	7,45%
Grand Total	94	100,00%

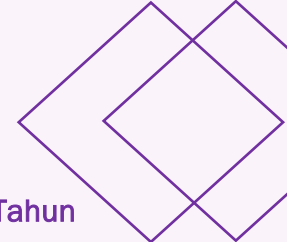




Lampiran III Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

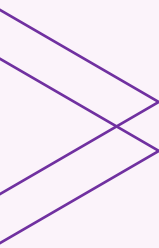
Golongan Kepangkatan	Jumlah	Persentase
II/a	2	2,13%
II/b	1	1,06%
II/d	1	1,06%
III/a	34	36,17%
III/b	14	14,89%
III/c	14	14,89%
III/d	18	19,15%
IV/a	5	5,32%
IV/b	3	3,19%
IX	2	2,13%
Grand Total	94	100,00%

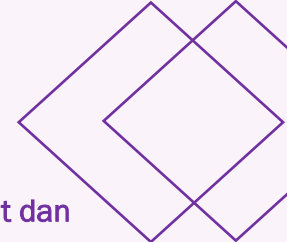




Lampiran IV Jumlah Pejabat Fungsional Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025

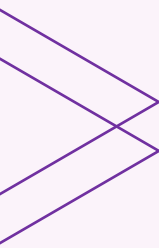
Jabatan Fungsional	Jumlah	Persentase
Analisis Hukum Madya	1	1,06%
Analisis Hukum Pertama	16	17,02%
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	3	3,19%
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	8,51%
Arsiparis Ahli Muda	7	7,45%
Arsiparis Ahli Pertama	1	1,06%
Arsiparis Mahir	1	1,06%
Penerjemah Ahli Madya	1	1,06%
Penerjemah Ahli Muda	1	1,06%
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2	2,13%
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	3	3,19%
Perancang PUU Ahli Pertama	1	1,06%
Pranata Humas Ahli Madya	3	3,19%
Pranata Humas Ahli Muda	12	12,77%
Pranata Humas Ahli Pertama	21	22,34%
Pranata Komputer Ahli Muda	1	1,06%
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1,06%
Pelaksana	11	11,70%
Grand Total	94	100,00%

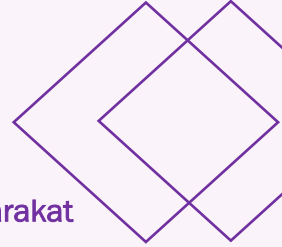




Lampiran V Daftar Prestasi/Penghargaan dan Inovasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025

No	Prestasi/Inovasi	Keterangan
1	Gold Winner Kategori PR Program & Bronze Winner Kategori Social Media Management pada Makaravox UI PR Awards	Pengakuan atas efektivitas program komunikasi publik dan pengelolaan media sosial BPS
2	Top 5 Lembaga Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal (Jan-Mar 2025)	Apresiasi dalam Bimtek Komdigi "Jago Mengelola Media Sosial" atas konsistensi amplifikasi kebijakan nasional
3	Pemimpin Perempuan Terpopuler di Media Sosial (Subkategori Kepala Lembaga) pada Anugerah Humas Indonesia	Pengakuan terhadap kepemimpinan Kepala BPS RI dalam membangun reputasi institusi di ruang digital
4	Terbaik 1 Kategori Website dan Terbaik 2 Kategori Media Audiovisual pada Anugerah Media Humas	Apresiasi atas kualitas pengelolaan website dan konten audiovisual BPS
5	Badan Publik Informatif (Nilai 97,55) pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Pengakuan atas komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik
6	Partisipasi aktif dalam ASEAN Community Statistical System Committee (ACSS15), Melaka	Kontribusi dalam penyepakatan Rencana Aksi ACSS 2026-2030 dan penguatan kolaborasi statistik ASEAN
7	Lead Country Study on Small Area Implementation in ASEAN 2023-2026	Penguatan posisi Indonesia dalam pengembangan metodologi statistik kawasan
8	Chair BIMP-EAGA Socio-Cultural Development WG (2025-2027) dan Chair IMT-GT ITI & Tourism WG (2025-2027)	Peran strategis dalam kerja sama pertumbuhan kawasan ASEAN
9	Nilai Audit Kearsipan Internal 2025 sebesar 95,370 (Kategori AA - Sangat Memuaskan) dan Unit Pengolah Terbaik ke-5	Cerminan tata kelola arsip, dokumentasi, dan manajemen informasi yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan

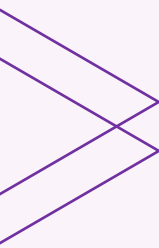


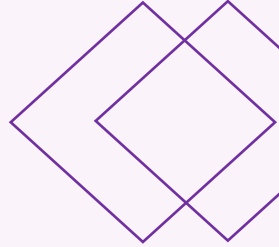


Lampiran VI Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2025

Alokasi Anggaran

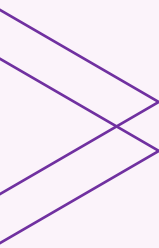
Klasifikasi Rincian Output(KRO)/ Rincian Output (RO)	Pagu Awal		Pagu Akhir		Self Blocking	Pagu yang dapat digunakan
	Pagu Awal	% terhadap Pagu Total	Pagu Akhir	% terhadap Pagu Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	373,55	0,54	0,00	373,55
Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi	2.571,60	7,60	37.522,40	54,07	8.035,99	29.486,40
Layanan Hukum	10.071,92	29,76	348,12	0,5	0,00	348,12
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.975,29	11,74	1.486,01	2,14	15,16	1.470,85
Layanan Protokoler	1.164,57	3,44	208,74	0,30	0,00	208,74
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.297,75	9,74	13.035,40	18,79	0,00	13.035,40
Layanan Bantuan Hukum	601,12	1,78	328,70	0,47	0,00	328,70
Layanan Perkantoran	6.800,60	20,09	15.635,44	22,53	935,35	14.700,09
Layanan Sosialisasi	5.365,37	15,85	451,70	0,65	0,00	451,70
Total Pagu Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	33.848,24	100,00	69.390,05	100,00	8.986,50	60.403,55

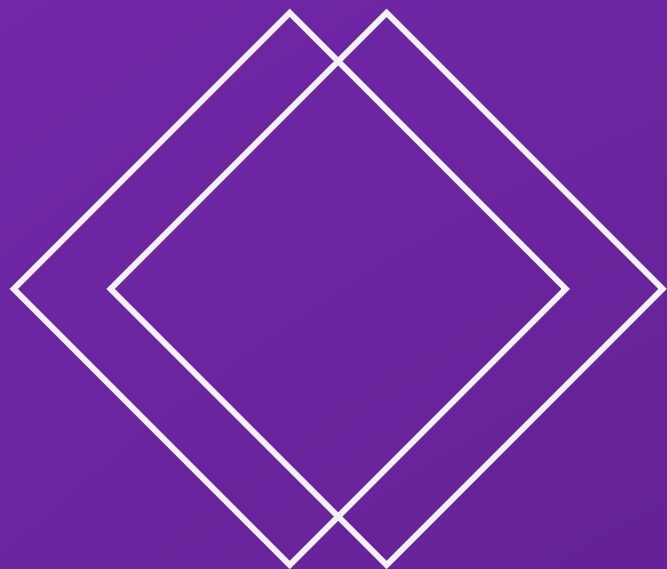




Capaian Kinerja

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien						
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Poin	4	5	4	100	80
Sasaran 2. Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional						
Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	100	100
Sasaran 3. Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya						
Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,10	98,50	99,00	100,92	100,51
Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	72	76	87,40	120,00	115,00





DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4

Homepage: <http://www.bps.go.id>

Email: bpshq@bps.go.id

